

PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - JERMAN



DEPARTEMEN PERTANIAN



341.7 (910-430)

Bibliografi

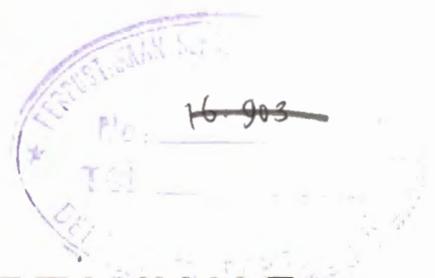
libl.

PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – JERMAN



S

(p. 43)



DEPARTEMEN PERTANIAN RI

2001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya **Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral Indonesia – Jerman**. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan wawasan dalam membangun kerjasama secara bilateral dengan negara tersebut.

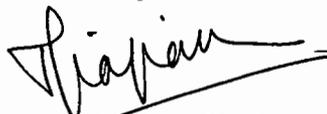
Buku kecil ini merupakan kumpulan informasi awal tentang kerjasama bilateral yang berisikan: keadaan umum negara Jerman, potensi sumberdaya alam dan pertanian yang dimiliki, perkembangan kerjasama bilateral dengan Indonesia dan peluang kerjasama yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang. Buku ini merupakan salah satu judul dari 35 judul Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral dan Regional yang disusun oleh Bagian Proyek Peningkatan Kerjasama Luar Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian untuk tahun 2001.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang dalam atas kerja keras tim kecil yang telah menyusun 35 judul buku dalam waktu singkat diantara kesibukan tugas sehari-hari.

Kami menyadari keterbatasan data dan informasi yang didapat, analisis yang masih dangkal serta kemampuan membuat narasi dalam kurun waktu yang sangat terbatas. Untuk itu dengan rendah hati kami mengharapkan masukan dari pembaca guna penyempurnaan buku ini pada saat mendatang.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan langkah kerjasama bilateral dengan negara Jerman.

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri



Ir. P. Natigor Siagian



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
I. KEADAAN UMUM	1
1.1. Sejarah Singkat	1
1.2. Politik dan Pemerintahan	3
1.3. Sosial Ekonomi	6
II. POTENSI NEGARA	8
2.1. Keadaan Geografis	8
2.2. Potensi Alam dan Pertanian	11
III. PERKEMBANGAN KERJASAMA	16
3.1. Kerjasama Bidang Politik	16
3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi	18
3.3. Kerjasama Teknik	23
IV. PELUANG KERJASAMA	53
LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Neraca Perdagangan Indonesia – Jerman (dalam jutaan US\$)	19
2.	Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM	55



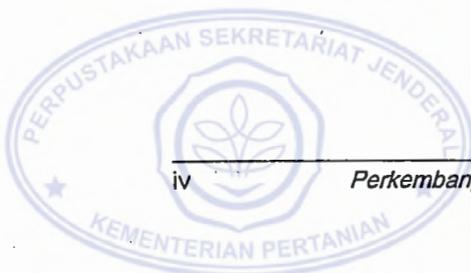
DAFTAR GAMBAR

Nomor	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Perkembangan Luas Areal Tanaman Sereal dan Umbi-umbian Negara Jerman Tahun 1991-1998	13
2.	Perkembangan Produksi Sereal dan Umbi-umbian Negara Jerman Tahun 1991-1998	14



TIM PENYUSUN

- Penasehat** : Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
- Pengarah** : Kepala Bagian Kerjasama Bilateral
Kepala Bagian Kerjasama Regional
- Penanggung Jawab** : Ir. Metralinda Tunus, M.Sc./ Kepala Bagian
Kerjasama Multilateral
- Ketua Tim** : Ir. Iwan Ridwan, MM.
- Anggota** : Drs. Djoko Supono, MM.
Ir. Zulkifli Ali, M.Si.
Ade Chandradijaya, S.TP., M.Sc.
Henny Nurliani, S.Pi.
Budi Supriyono
Yayah Mardianah, SE.
Ir. Juariah
Budiarto
Nunik Ernawatingtyas
Abidan Rajaguguk
Ending



I. KEADAAN UMUM

1.1. Sejarah Singkat

Penyerahan tanpa syarat tentara Jerman pada tanggal 8-9 Mei 1945 menandai berakhirnya Perang Dunia II di Eropa. Sesuai dengan persetujuan Postdam pada tanggal 5 Juni 1945, Jerman dibagi 4 daerah kekuasaan Sekutu. Setelah perundingan-perundingan untuk mempersatukan Jerman dibawah satu pemerintahan oleh Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Soviet (pada waktu itu) mengalami kegagalan, maka ketiga wilayah yang dikuasai oleh tiga negara Barat diintegrasikan secara ekonomis dalam tahun 1948. Undang-Undang Dasar sementara, disebut *Grundgesetz*, yang mulai berlaku di ketiga wilayah (kecuali *Saarland*) pada bulan Mei 1949.

Presiden RFJ pertama adalah Prof. Dr. Theodor Heuss (FDP) dan Kanselir yang pertama adalah Konrad Adenauer (CDU). Dalam bulan Oktober 1949, daerah yang diduduki oleh Uni Soviet menyatakan diri sebagai *Deutsche Demokratische Republik* (DDR). Republik Demokrasi Jerman (RDJ) dengan Berlin Timur sebagai ibukota. Dengan demikian sisa kota Berlin yang dikuasai Sekutu Barat menjadi semacam pulau RPJ dalam wilayah RDJ. Dengan terbentuknya Pemerintah Federal, maka pendudukan militer dirubah menjadi hubungan pertahanan atas dasar persetujuan. Persetujuan Paris 1954 memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada RFJ sejak tanggal 5 Mei 1955 dan Jerman masuk dalam keanggotaan NATO. Dalam tahun 1957 *Bundestag* (Parlemen Federal) menyatakan Berlin sebagai ibukota Jerman dan RFJ tetap menghendaki Jerman Bersatu. Sebelum hal ini terlaksana, kedudukan pemerintahan RFJ adalah di Bonn.

Pada tanggal 25 Januari 1987 telah dilaksanakan Pemilu untuk memilih anggota parlemen RFJ (*Bundestag*) ke-19 yang berhasil mendudukan kembali koalisi CDU/CSU-FDP untuk memegang kekuasaan pemerintahan RFJ selama periode tahun 1987-1991 dibawah Kanselir Helmut Kohl (CDU). Kemampuan koalisi merebut suara pemilih karena keberhasilan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi RFJ dan citra politik luar negeri dibawah Menlu Hans-Dietrich Genscher (FDP). Pada Pemilu Oktober 1994, CDU/CSU-FDP mendapatkan kemenangan tipis dan kembali memegang pemerintahan hingga 1998:

Setelah 16 tahun dipegang oleh CDU, Pemerintahan Jerman akhirnya jatuh ke tangan SPD melalui Pemilu 27 September 1998. SPD kemudian berkoalisi dengan Partai Hijau untuk membentuk pemerintahan Jerman yang baru.

Reunifikasi Jerman

Kebijaksanaan *Perestroika* dan *Glasnost* Uni Soviet telah mempengaruhi usaha-usaha demokratisasi politik dan ekonomi di negara-negara Eropa Timur. Rezim Honecker di Jerman Timur akhirnya tidak dapat membendung arus reformasi untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Runtuhnya Tembok Berlin pada tanggal 9 November 1989 membawa era baru hubungan RFJ-RDJ. Gagasan penyatuan Jerman yang sebelumnya dianggap mustahil, kini menjadi topik bukan hanya di dalam negeri RFJ dan RDJ saja, tetapi sudah menjadi masalah internasional.

Kanselir Kohl pada tanggal 28 November 1989 mengusulkan 10 butir utama yang ber-intikan proses penyatuan melalui tahapan komisi bersama, konfederasi dan federasi. Usulan tersebut juga disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi begitu cepat, antara lain pertemuan



perkembangan yang terjadi begitu cepat, antara lain pertemuan 2+4 antara para Menlu AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan Kedua Jerman dalam rangka pertemuan *Open Sky* di Ottawa pada awal Februari 1990. Pertemuan ini selanjutnya disusul lagi di Bonn, Berlin, Paris dan terakhir pada bulan September 1990 di Moskow dimana ditandatangani Perjanjian antara Sekutu dan Jerman yang mengatur aspek luar negeri Jerman antara lain mengenai kekuatan Angkatan Bersenjata RFJ, keanggotaan Jerman dalam NATO dan perbatasan wilayah RFJ-Polandia.

Aspek dalam negeri Penyatuan Jerman diatur melalui dua perjanjian yaitu:

- a) Perjanjian Penyatuan Ekonomi Keuangan dan Sosial yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1990.
- b) Penyatuan Politik, Pemerintahan dan hukum yang berlaku pada tanggal 3 Oktober 1990. Pemilu bersama yang pertama sejak tahun 1933 pada waktu Jerman masih bersatu, diadakan tanggal 2 Desember 1990.

1.2. Politik dan Pemerintahan

a. Sistem Kepartaian

UUD RFJ menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai kebebasan untuk mendirikan partai. Untuk dapat terwakili di *Bundestag* RFJ, setiap partai harus dapat memperoleh paling sedikit 5 % dari seluruh suara yang masuk dalam pemilu nasional atau paling sedikit sanggup memenangkan 3 kursi langsung. Dewasa ini terdapat 6 partai besar yang terwakili dalam parlemen RFJ (*Bundestag*), yaitu partai-partai CDU, CSU, SPD, FDP, die Grunen dan PDS.



b. **Pembagian Kekuasaan Negara**

Kekuasaan Eksekutif : Presiden Federal (*Bundespräsident*) dipilih pada Konvensi Federal (*Bundesversammlung*), yang terdiri dari anggota - anggota *Bundestag* dan suatu jumlah berimbang dari anggota-anggota terpilih oleh parlemen negara bagian (menurut jumlah penduduk). Yang berhak memilih adalah warga negara yang telah berusia 40 tahun keatas, dipilih untuk selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu masa jabatan berikutnya. Presiden Federal mewakili negara federal dalam hubungan internasional dan mengangkat serta menerima duta besar (seremonial). Pemilihan Presiden terakhir pada 23 Mei 1999.

Pemerintah Federal (*Bundesregierung*) terdiri atas Kanselir dan Menteri-menteri Federal. Kanselir, yang dipilih dengan suara mayoritas oleh Parlemen Federal (*Bundestag*) atas usul Presiden Federal. Menteri-menteri diangkat dan dibebaskan-tugaskan oleh Presiden atas usul Kanselir. Parlemen dapat menyatakan tidak percaya pada Kanselir hanya apabila dapat memilih penggantinya yang didukung oleh mayoritas anggotanya.

Apabila Kanselir tidak dapat memperoleh dukungan kepercayaan mayoritas anggota Parlemen maka atas usul Kanselir, Presiden dapat membubarkan Parlemen dalam waktu 21 hari, kecuali apabila Parlemen dapat memilih Kanselir lain dalam tenggang waktu tersebut.

Kekuasaan Legislatif : Anggota-anggota *Bundestag* (Parlemen Federal) dipilih oleh rakyat secara menyeluruh, bebas, langsung dan rahasia untuk periode 4 tahun. Setiap warganegara yang telah berusia 18 tahun bebas untuk



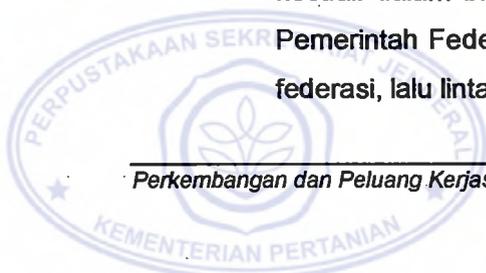
memilih dan dipilih. Jumlah anggota *Bundestag* pada waktu ini adalah 656 orang. Pemilu terakhir pada 27 September 1998.

Bundesrat atau Dewan Federal adalah Dewan yang merupakan wakil dari negara-negara bagian, melalui badan ini negara-negara bagian berpartisipasi di dalam perundang-undangan dan administrasi Pemerintah Federal. *Bundesrat* terdiri dari anggota-anggota pemerintah negara bagian, dimana pemerintah negara bagian berhak menunjuk dan memanggilkannya kembali (*recall*). Tiap negara bagian paling tidak mempunyai 3 suara, untuk negara bagian yang berpenduduk lebih dari dua juta sebanyak 4 suara, lebih dari enam juta mempunyai 6 suara. Keputusan diambil dengan suara terbanyak. Jumlah anggota *Bundesrat* pada waktu ini adalah 68 orang.

Kekuasaan Yudikatif : Pengadilan Federal, yang terdiri dari 5 pengadilan sebagai berikut : Pengadilan Umum, Pengadilan Buruh, Pengadilan Administrasi, Pengadilan Sosial, Pengadilan Pajak. Disamping itu, terdapat Pengadilan Konstitusi Federal, yaitu Mahkamah Tertinggi yang juga sebuah Badan Konstitusional.

c. **Sistem Pemerintahan**

RFJ adalah negara demokrasi yang berbentuk federasi dan terdiri dari 16 negara bagian. Masing-masing negara bagian mempunyai pemerintahan dan UU sendiri. UU tersebut secara prinsipil tidak boleh menyimpang dari UU federal. Pemerintah negara bagian berwenang mengatur daerahnya, kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang berada di tangan Pemerintah Federal, antara lain urusan luar negeri, keuangan federasi, lalu lintas yang penting dan angkatan bersenjata.



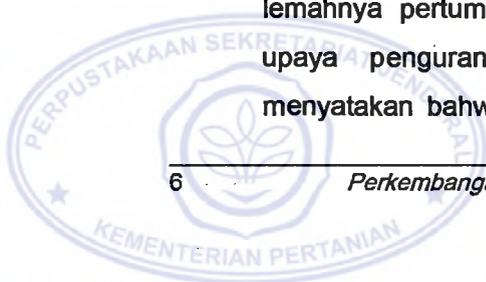
d. Konstitusi

UUD Jerman (*Grundgesetz*) dibuat pada tahun 1949. Dengan terjadinya penyatuan Jerman pada tanggal 3 Oktober 1990 bagian pembukaan dan penutupan *Grundgesetz* diubah dan sejak saat itu *Grundgesetz* berlaku di seluruh wilayah Jerman. Artikel pembukaan *Grundgesetz* menjamin harkat dan martabat sesama manusia, kebebasan dalam perkembangan pribadi, persamaan untuk setiap orang didepan hukum dan kebebasan dalam kepercayaan dan keyakinan. Setiap orang bebas mengemukakan pendapat dan pikirannya baik melalui ucapan, tulisan, maupun gambar-gambar. Dalam batasan yang sangat ketat, *Grundgesetz* memberi kemungkinan untuk membatasi hak-hak asasi tertentu secara langsung atau tidak langsung melalui undang-undang.

1.3. Sosial Ekonomi

Masalah pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Pemerintah Jerman, sekalipun pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan laju inflasi dapat ditekan. Pada bulan Mei 2000 tercatat 3,74 juta penganggur (sebagian besar berada di Jerman bagian Timur), menurun dibandingkan dengan tahun 1999 dimana terdapat 4 juta penganggur. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Jerman diperkirakan akan mencapai 2,2%.

Lembaga Riset Ekonomi Jerman (*Deutsche Institut fuer Wirtschaft/DIW*) di Berlin dalam prognosa tahunannya yang disampaikan tanggal 3 Januari 2001 memperkirakan bahwa lemahnya pertumbuhan ekonomi Jerman akan memperlamban upaya pengurangan tingkat pengangguran. Direktur DIW menyatakan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2001



menyatakan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2001 sebesar 3% yang disampaikan Kantor Kanselir Jerman, tidak akan tercapai. Salah satu penyebabnya adalah politik keuangan yang dijalankan selama ini tidak benar. DIW memperkirakan tingkat inflasi tahun 2001 akan mencapai 1,4%, dan tahun 2002 sebesar 1,3%. Perkembangan ekonomi di wilayah Jerman bagian Timur juga masih akan tetap ketinggalan. Tahun 2001 ekonomi di wilayah ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 2% dan tahun 2002 sebesar 2,4%.



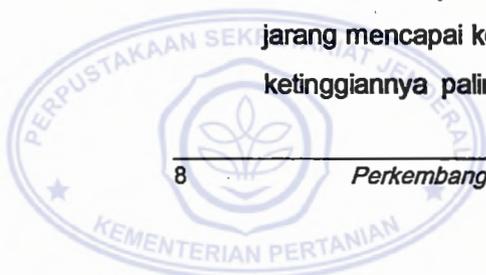
II. POTENSI NEGARA

2.1. Keadaan Geografis

Nama resmi negara ini adalah Bunders republik Deutschland dengan ibukota Berlin. Luas negara Jerman ini sebesar 356.957 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 80.293.000 orang dan bahasa resmi yang dipergunakan adalah Bahasa Jerman. Agama yang dianut penduduk adalah Katolik Roma (43%), Protestan/Lutheran (40%), Islam (3%) dan Kepercayaan lain (14%), Bentuk pemerintahannya adalah *Republik* dengan kepala negara bernama *Presiden* dan kepala pemerintahan bernama *Kanselir*. Sedangkan mata uang yang dipergunakan adalah *Deutsche Mark (DM)*.

Dilihat dari sudut reliefnya, wilayah Jerman dapat dibagi atas tiga bagian utama : Dataran rendah Utara (bagian dari dataran luas Eropa), Tanah Tinggi Tengah, dan Pegunungan Alpen Jerman (bagian dari Peg. Alpen Eropa). Dataran Rendah Utara merupakan tanah yang agak bergelombang. Pantai utaranya dangkal, penuh dengan endapan lumpur dari S. Ems, S. Weser, dan S. elbe; di sepanjang garis pantai ini berderet Kep. Friesland Timur dan sejumlah pulau lain. Sedang pantai L. Baltik mempunyai banyak teluk (seperti Teluk Kiel, Teluk Lubeck dan Teluk Pommeria) dan forden (teluk kecil yang berliku-liku) tetapi hanya dimasuki beberapa sungai.

Di bagian barat dataran rendah itu, tepatnya di belakang daerah rawa-rawa yang telah direklamasi di daerah pantai, terdapat daerah perbukitan pasir (*geest*) dan tanah berlumpur (*moor*). *Geest* itu, yang terdiri atas lapisan batu-batuan dan pasir, merupakan salah satu kawasan paling tandus diseluruh Jerman. Barisan bukit pasir itu jarang mencapai ketinggian 50 m, dan diantara S. Ems dan S. weser ketinggiannya paling sekitar 15 m diatas permukaan laut. Antara

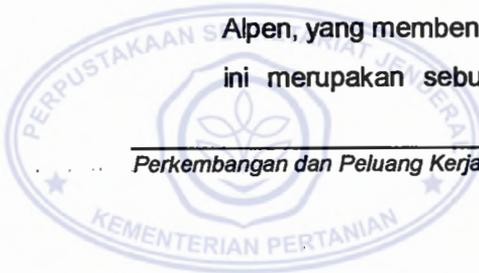


rangkaian bukit-bukit geest terdapat kawasan tanah berlumpur (moor), yang di beberapa tempat mencapai kedalaman sekitar 15 m. Moor ini sebagian besar sudah direklamasi untuk pertanian dalam abad ini, tetapi masih ada ratusan are yang belum berpenghuni dan belum dibudidayakan.

Di bagian selatan, dataran rendah itu memasuki kawasan Tanah Tinggi Tengah, sampai ke jantung Westfalen dan jauh ke dalam lembah S. Rhein. Batas antara Dataran Rendah Utara dan Tanah Tinggi Tengah adalah sabuk tanah loss yang membentang dari "teluk" Kolin sepanjang daerah Ruhr dan tepi Perbukitan Weser (Borde).

Tanah Tinggi Tengah merupakan suatu kelompok bukit yang berbeda. Bagian yang tertinggi dan batu-batuan yang tertua di bagian barat terdapat di Peg. Odenwald dan Peg. Schwarzwald (G. Feldberg, 1.493 m), sedang di bagian timur terdapat ditanah tinggi Hercynia yang terdiri dari atas Peg. Harz (G. Brocken, 1.142 m), hutan Thuringen, dan Peg. Erzgebirge (puncak tertinggi G. Fichtelberg, 1.214 m). Di antara masif-masif ini terdapat bongkah-bongkah besar batu-batuan dari Zaman Trias (perbukitan Weser dan Hessen) dan lereng-lereng curam. Berdampingan dengan tanah tinggi Thein terdapat daerah-daerah vulkanis, diantaranya yang paling luas terdapat di Peg. Vogelsberg, Peg. Thon, peg. Westerwald dan Peg. Eifel.

Pegunungan Alpen di Jerman mencapai puncak tertinggi di bagian barat Peg. Alpen Bavaria, yaitu di G. Zugspitze (2.963 m), gunung tertinggi di seluruh Jerman. Pegunungan Alpen yang sangat dipengaruhi glasiasi bermula dari perbukitan yang berketinggian sekitar 600-700 m. Perbukitan ini menandai bagian depan Peg. Alpen, yang membentang sampai ke S. Donau di utara. Bagian depan ini merupakan sebuah lembah yang dalam, yang mengandung



lapisan reruntuhan Peg. Alpen sampai kedalaman ratusan meter sejak Zaman Tersier (lebih dari 11 juta tahun yang lalu). Diselatan, batu-batuan Tersier muncul pada permukaan berupa bukit-bukit rendah yang terbentuk dari tanah liat dan batu pasir.

Bagian depan Peg. Alpen itu dialiri sungai-sungai berarus deras yang bermuara ke S. Donau. Sungai Donau itu sendiri mengalir lewat sebuah lembah yang luas di utara bagian depan pegunungan itu sebelum menembus tepi hutan Bavaria dekat sebuah ngarai yang sempit di utara Passau.

Iklim di Jerman cukup seragam : hangat pada musim panas dan sejuk pada musim dingin. Tetapi ada sedikit perbedaan antara iklim kawasan pantai dan kawasan pedalaman. Karena pengaruh laut, kawasan pantai lebih sejuk pada musim panas dan lebih hangat pada musim dingin dibandingkan dengan daerah pedalaman beriklim basah, sedang daerah pedalaman beriklim kering. Dalam bulan Januari, daerah utara dan barat laut memiliki suhu rata-rata 17-18 C. Di bagian timur dan selatan musim dingin lebih dingin dan musim panas lebih hangat, suhu rata-rata-1 C pada bulan Januari dan 18 C pada bulan Juli. Daerah beriklim paling baik adalah Wurttemberg dan Lembah S. Rhein, S. Elbe, S. Saale, dan S. Spree; disini, pada musim dingin, udara sangat sejuk (rata-rata di atas 0 C dan hari-hari yang sangat dingin hanya sedikit, sedang pada musim panas suhu rata-rata pada bulan Juli mencapai 20 C.

Curah hujan bervariasi menurut keadaan setempat. Kawasan dataran rendah di bagian utara dan tengah relatif lebih kering, dengan curah hujan kurang dari 600 mm per tahun. Sejumlah daerah di tanah tinggi, khususnya di Peg. Alpen, Schwarzwald, dan Peg. Harz, memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm pertahun. Kebanyakan daerah yang terletak di Tanah Tinggi Tengah menerima curah hujan lebih dari 740 mm pertahun. Kebanyakan daerah yang terletak di

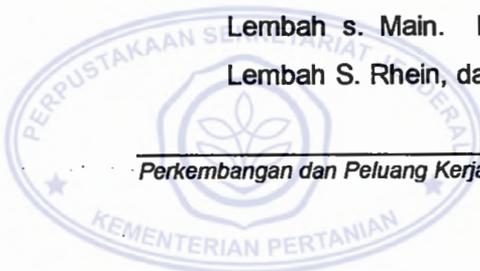


lebih dari 740 mm pertahun. Kebanyakan daerah yang terletak di Tanah Tinggi Tengah menerima curah hujan lebih dari 740 mm per tahun, sementara sejumlah tempat di sebelah barat daya menerima hujan lebih banyak. Sedang daerah di bagian tenggara dan daerah bayangan hujan, kawasan yang paling kering di negeri ini adalah kawasan sepanjang S. Oder.

2.2. Potensi Alam dan Pertanian

Sektor pertanian hanya menyerap 3 persen tenaga kerja dan persentase ini makin lama makin berkurang, khususnya sejak peningkatan mekanisasi dalam bidang pertanian. Meskipun demikian, pertanian tetap merupakan sektor penting dalam perekonomian Jerman. Sebagian besar tanah pertanian di bekas wilayah Jerman Barat ditanami padi-padian dan umbi-umbian dalam proporsi yang seimbang. Kedua tanaman ini umum terdapat di Peg. Alpen utara dan lereng-lereng di wilayah Jerman bagian selatan. Padi-padian dominan di Peg. Alpen dan di Bavaria utara, sementara umbi-umbian dominan disekitar Numberg, Wurzburg, dan Franksfurt-am-Main. Padi-padian dan umbi-umbian juga terdapat di Perbukitan weser, Westfalen, daerah geest antara Osnabruck dan Oldenburg, dan Luneburg Heide. Di bagian utara, gandum hitam sering dijadikan tanaman utama, sedang di selatan lebih umum gandum. Kentang merupakan tanaman utama di Luneburg Heide, sedang bit gula unggul di kawasan tanah loss di sekitar Hannover, Braunschweig dan "teluk" Koln.

Tanaman khusus lainnya mencakup anggur dan buah-buahan lainnya. Anggur terbatas pada Lembah S. Rhein, Lembah S. Mosel, daerah sekitar Heilbronn di utara Stuttgart, dan bagian tengah Lembah s. Main. Buah-buahan lainnya juga banyak terdapat di Lembah S. Rhein, dataran tinggi "teluk" Koln, dan sepanjang lembah



S. Elbe di selatan Hamburg. Daerah luas di utara Munchen dikhususkan untuk tanaman buah hop.

Pertanian yang paling produktif di bekas wilayah Jerman Timur terdapat dibagian selatan, yang juga merupakan daerah berpenduduk paling padat sekaligus daerah berpenduduk paling padat sekaligus daerah industri. Sabuk tanah loss di sekitar Peg. Harz timur termasuk daerah paling subur di seluruh Jerman. Di kawasan itu hampir tidak ada padang rumput, dan bit gula merupakan tanaman yang paling penting.

Sejak perang Dunia II pertanian di RF. Jerman mengalami perubahan besar. Sebahagian besar petani meninggalkan tanah pertaniannya untuk bekerja di sektor industri dan perusahaan-perusahaan. Pada tahun 1950, dari 100 orang, hanya 20 orang yang masih bekerja di sektor pertanian, bahkan sekarang hanya tinggal 5 orang (1984). Pada periode yang sama lahan pertanian turun dari 1,6 juta hektar menjadi 750.000 hektar.

Walaupun perencanaan penggabungan lahan telah meningkat menjadi ukuran menengah sampai besar sejak tahun 1950, namun pemilikan lahan ukuran kecil sampai menengah diatas 30 hektar masih merupakan mayoritas. Hampir separoh dari petani hanya menggunakan sebahagian waktunya untuk bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu sebahagian besar pendapatan petani berasal dari luar pertanian. Dibahagian timur negara RF. Jerman, karena penduduknya menggunakan waktunya hampir 90 % untuk bekerja di sektor pertanian.

Dengan digunakannya metode manajemen modern dan mekanisasi peralatan pertanian, dapat meningkatkan produksi pertanian di negara RF. Jerman, khususnya temak unggas, babi dan penggemukan sapi. Ini mengakibatkan setiap petani di RF. Jerman (1984) dapat mensupply makanan untuk 60 orang, jauh lebih besar

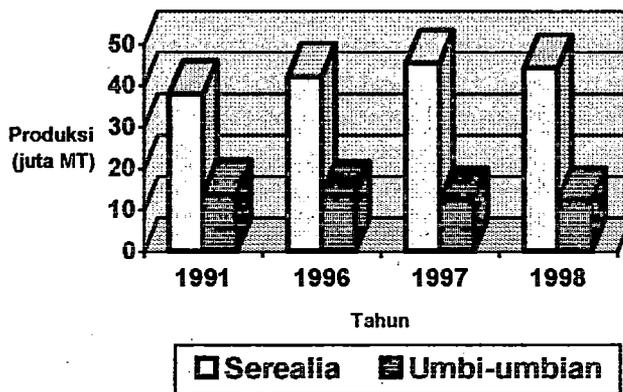


jika dibandingkan dengan tahun 1970 (10 orang). Kenaikan produksi peternakan kebanyakan babi, sedangkan populasi kuda naiknya tidak begitu besar dan hanya digunakan untuk olah raga berkuda pada waktu luang.

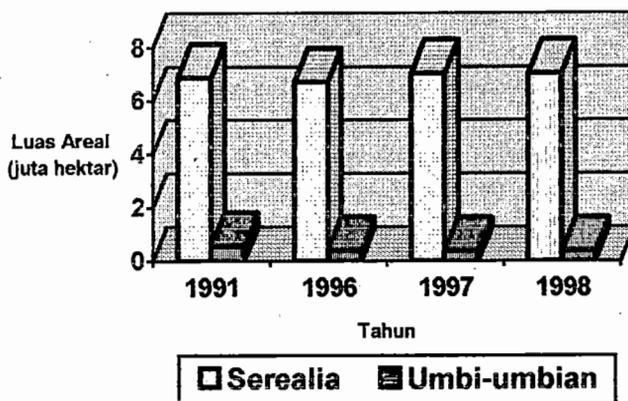
Pertanian tanaman pangan menghasilkan tepung makanan dan padi-padian, kentang, gula bit, sayur-sayuran dan buah-buahan yang sebahagian besar dihasilkan oleh petani yang tinggal di Negara Bagian Nieder-Sachsen (Lower Saxony), Bayern (Bavaria), Hessen dan Schleswig-Holstein.

Perkembangan produksi dan luas areal komoditas sereal dan umbi-umbian di Jerman dari tahun 1991 s/d 1998 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Data Perkembangan Produksi Sereal dan Umbi-umbian Negara Republik Federal Jerman tahun 1991-1998



Gambar 1. Data Perkembangan Luas Areal Tanaman Serealia dan Umbi-umbian Negara Republik Federal Jerman tahun 1991-1998



Dalam dekade ini Industri perikanan juga mengalami perubahan, yaitu dengan berkembangnya mekanisasi peralatan penangkapan dan mengurangi penangkapan yang bersifat tradisional, dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan.

Adanya Hukum Laut Internasional yang mana setiap negara pantai memperlakukan Zone Economy Exclusive (sejauh 200 mil dari pantai) menyebabkan daerah armada penangkapan nelayan RF. Jerman di Laut Atlantik dan Laut Utara menjadi berkurang, yang secara langsung mengakibatkan turunnya jumlah armada penangkapan dari 110 kapal (1980) menjadi 16 kapal (1984) sehingga produksi perikanan menurun.

Pada tahun 1983 Pemerintah RF. Jerman mengeluarkan kebijaksanaan bagi penggunaan pesisir pantai untuk pengembangan berbagai usaha perikanan, untuk mengatasi turunnya produksi perikanan.

Kebijaksanaan pertanian nasional RF. Jerman adalah menjamin kemakmuran sosial. Prioritas utama ditujukan untuk meningkatkan perekonomian petani dan keluarganya baik petani

penuh maupun petani sambilan dengan memberikan gaji. Disamping meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi yang dihasilkan, memperbaiki keadaan lingkungan dengan jalan menurunkan beban lingkungan dan proteksi dasar kehidupan alam serta mengurangi beroperasinya perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pertanian.

Negara-negara Bagian mengambil langkah untuk memodernisasi desa, konsolidasi lahan dan investasi bantuan untuk memodernisasi peralatan pertanian, rumah kediaman serta bantuan pendapatan bagi petani yang kehilangan lahan dengan memberikan subsidi jaminan sosial.

Kebijaksanaan Pemerintah RF. Jerman dibidang pangan adalah menjamin kuantitas dan kualitas berbagai komoditi yang memadai untuk persediaan makanan penduduk dengan harga yang sesuai.

Sejak disatukannya Instansi Produksi Pertanian dengan Persediaan Makanan dibawah satu Kementerian Pangan, Pertanian dan Kehutanan. Instansi ini memberikan laporan mengenai pangan secara periodik atas dasar penemuan baru, keadaan dan masalah yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pangan. laporan-laporan ini juga merupakan dasar untuk pendidikan tentang pemberian makanan tambahan yang optimal dan petunjuk untuk memproduksi dan memproses berbagai komoditas pertanian.

Pemerintah Federal sangat mendukung penelitian dibidang pangan, yang merupakan informasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selama 25 tahun terakhir terjadi perubahan mengkonsumsi makanan di RF. Jerman, terjadi penurunan dalam mengkonsumsi kentang, padi-padian, kacang-kacangan dan susu, naik dalam mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, keju, telur dan daging (terutama daging babi).



III. PERKEMBANGAN KERJASAMA

3.1: Kerjasama Bidang Politik

Politik luar negeri RFJ dititikberatkan pada hubungan dengan Uni Eropa (UE); kemitraan trans-atlantik dengan Amerika Serikat (AS) di dalam NATO serta dengan Jepang dan Rusia dalam G-8. RFJ mendukung upaya perluasan kerjasama UE dan restrukturisasi kelembagaan UE yang menjadi prasyarat perluasan keanggotaan. RFJ menjadikan tahun 2000 sebagai momentum bagi upaya pengembangan UE ke arah Eropa timur, tengah dan selatan. Kanselir Schroeder menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan polugri pemerintahan Koalisi SDP-Partai Hijau, termasuk hasil KTT UE di Nice, khususnya yang menyangkut penambahan jumlah anggota UE. Menyangkut masa depan UE, Jerman cenderung mengarah pada Eropa yang federalistis, sebagaimana pernah diusulkan Menlu Fischer bulan Juni 2000.

Dalam skala internasional, Jerman menginginkan keanggotaan tetap DK-PBB. Rintisan ke arah ini telah dikembangkan salah satunya dengan turut berpartisipasi dalam pasukan pemeliharaan perdamaian PBB di Kosovo dan Timtim (kontingen medis). Pada pidato politik tahunan bulan Nopember 2000, Kanselir Schroeder menyampaikan keinginan Jerman untuk memperkuat kontak dan membangun hubungan baik yang secara tradisional telah terjalin dengan kawasan-kawasan lain, seperti Asia, Afrika dan Timur Tengah.

Hubungan bilateral RI-RFJ berjalan dengan baik dan telah memperoleh momentum baru, khususnya sebagai dampak iklim keterbukaan politik ke arah demokratis di Indonesia yang diawali



oleh Presiden Habibie dan berlanjut di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dan kiranya membuka peluang bagi upaya peningkatan hubungan bilateral. Hal di atas tercermin dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Semula dikhawatirkan, politik luar negeri RFJ di bawah pemerintahan koalisi SPD-Partai Hijau akan menjadi salah satu kendala dalam hubungan bilateral RI-RFJ, khususnya mengingat kecenderungan agresif Partai Sosialisme dan Partai Hijau dalam masalah ini (antara lain dengan menunjuk pejabat tinggi urusan HAM, Gerd Poppe (Partai Hijau) yang bertanggung jawab langsung kepada menlu dan dampaknya terhadap pengkaitan bantuan ekonomi dengan perkembangan HAM serta keanggotaan mantan Menkeh RFJ, Ny. Sabine Leutheusser Scnarrenberger (FDP) yang duduk sebagai salah satu anggota tim pencari fakta PBB di Timtim. Namun, kekhawatiran tersebut tidak terbukti, mengingat perkembangan positif di bidang HAM di Indonesia pasca lengseinya Presiden Soeharto.
- Dukungan konsisten Pemerintah RFJ terhadap integritas bangsa dan negara RI serta upaya demokratisasi di Indonesia.

Saat ini hubungan RI-RFJ dapat dilihat dari intensitas kunjungan timbal balik Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi kedua negara antara lain : kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Jerman (3-4 Februari 2000), kunjungan Direktur Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Kemlu RFJ Mr. Jurgen Staks (Maret 2000)), kunjungan Ketua DPR RI ke Jerman (Mei 2000), kunjungan Delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Jerman (Bundestag) ke Indonesia (Mei 2000), kunjungan anggota Bundestag/



Deputy Koalisi CDU/CSU Dr. Klaus W. Lippold (Juli 2000) dan kunjungan Menlu RFJ Joschka Fischer (2-3 Nopember 2000). Indikator lain adalah diselenggarakannya pameran *Techno-Germa* di Jakarta pada bulan Maret 1999; *Sister City Agreement Jakarta-Berlin* tahun 1999; bantuan teknis untuk studi banding bagi penyusunan UU tentang parpol, UU tentang pemilu, UU tentang kemandirian perbankan serta penerapan konsep desentralisasi di Indonesia; serta partisipasi Indonesia dalam Expo Dunia 2000 di Hannover tanggal 1 Juni-31 Oktober 2000.

3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi

a. Dasar Hubungan

Hubungan perdagangan antara Indonesia - R.F. Jerman didasarkan atas suatu Persetujuan Dagang, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 April 1953. Persetujuan tersebut hingga saat ini masih tetap berlaku secara tacit understanding.

b. Realisasi Perdagangan

Menurut BPS, neraca perdagangan antara Indonesia dengan R.F. Jerman dalam 4 tahun terakhir (1996-2000) selalu menunjukkan saldo defisit bagi Indonesia, namun pada tahun 2000 mulai menunjukkan surplus untuk Indonesia seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Volume perdagangan tahun 2000 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar US\$ 911,8 juta (25,33%) dibandingkan tahun 1999. Namun demikian nilai ekspor Indonesia mengalami sedikit peningkatan sebesar US\$ 209,3 juta (16,96%), sedangkan nilai impor mengalami



209,3 juta (16,,96%), sedangkan nilai impor mengalami penurunan tajam sebesar US\$ 1.121,1 juta (47,38%). Dengan meningkatnya nilai ekspor Indonesia dan menurunnya nilai impor Indonesia dari Jerman menyebabkan saldo positif untuk Indonesia

Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia - R.F. Jerman (dalam jutaan US dollar)

Tahun	Ekspor	Impor	Saldo	Volume
1996	1.489,0	3.001,4	- 1.512,4	4.490,4
1997	1.465,7	2.68,6	- 1.162,9	4.093,3
1998	1.401,3	2.140,9	- 739,6	3.542,2
1999	1.233,8	2.365,7	- 1.131,9	3.599,5
2000	1.443,1	1.244,6	198,5	2.687,7

Sumber : Badan Pusat Statistik

Ekspor Indonesia ke R.F. Jerman berupa komoditi non-migas terutama kopi, teh, ikan dan ikan olahan, minyak dan lemak nabati, margarine dan sejenisnya, tembakau, kakao, sepatu kulit, barang dari kulit, produk elektronik, mainan anak-anak, barang dari kayu, tekstil dan produk tekstil, barang optik, barang farmasi, sepeda.

Impor Indonesia dari R.F. Jerman terutama adalah mesin untuk mengerjakan tekstil dan kulit, mesin cetak dan kertas, kendaraan bermotor darat, mesin-mesin pembangkit tenaga, produk elektronik, bahan pewarna tir, pompa dan kompresor, mesin industri.



1. Hambatan Tarif :
Sebagian besar barang-barang ekspor dari Indonesia tetap diharuskan membayar bea masuk di UE.
2. Hambatan Non-Tarif terdiri dari UE :
 - a. adanya pembatasan kuantitatif berupa kuota untuk beberapa jenis tekstil dan produk tekstil dan manik
 - b. anti-dumping policy UE yang makin diperketat
 - c. Standarisasi khusus untuk produk-produk tertentu menghambat perkembangan beberapa ekspor komoditi
 - d. Diberlakukannya Ordonansi Pengemasan di Jerman terhitung sejak tanggal 1 Januari 1992.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Indonesia :
 - Ada kalanya kualitas barang belum sesuai dengan permintaan pasar dan harga kurang kompetitif.
 - Eksportir Indonesia belum mempunyai informasi pasar yang akurat.
 - Belum banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang memanfaatkan GSP yang diberikan oleh ME, termasuk Jerman.
 - Sebagian pengusaha Indonesia masih kurang profesional.
 - Pengisian formulir "Export-Licence (EL) dan Certificate of Origin yang sering salah untuk ekspor TPT yang terkena kuota.
 - Tuduhan dumping "unbleached cotton fabric", Jerman pada prinsipnya tetap pada posisi semula untuk tidak mendukung rencana kebijaksanaan UE karena masih



banyak industri Jerman yang memerlukan produk tersebut.

d. Peningkatan Hubungan Perdagangan

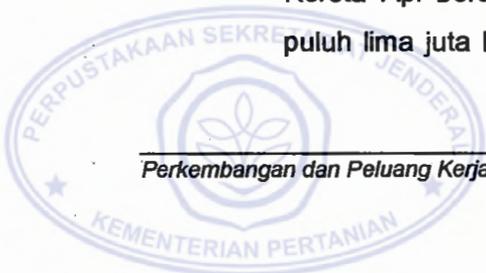
Hubungan perdagangan kedua negara selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, ditandai dengan:

- Kunjungan Presiden RI ke RFJ pada bulan Pebruari 2000.
- Peran serta pengusaha Indonesia dalam Pameran "Frankfurt Messe", Pebruari 2000.
- Pelaksanaan "Indonesia Forum" dalam Pekan Asia Pasifik di Berlin pada bulan Oktober 2000
- Peran serta Pemerintah Indonesia dalam Expo Dunia 2000 di Hannover pada bulan Juni hingga Oktober 2000 dengan membangun Paviliun Indonesia.

e. Kerjasama Keuangan

RFJ adalah salah satu negara donor penting bagi Indonesia dalam kerangka CGI. *Pledge* RFJ sejak CGI berdiri adalah sbb.: US\$ 135,5 juta (1992), US\$ 138,7 juta (1993), US\$ 157,4 juta (1994), US\$ 125 juta (1995), US\$ 208,7 juta (1996), US\$ 66,3 juta (1997), US\$ 300 juta (1998), US\$ 39,7 juta (1999), US\$ 102 juta (2000).

Pada tanggal 2 Nopember 2000 di Jakarta, telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah RFJ mengenai Kerjasama Keuangan tahun 1999 untuk "Proyek Program Sektor Jalan Kereta Api berupa pinjaman sebesar DM. 25.000.000 (Dua puluh lima juta Deutsche Mark) dan "Proyek Pencegahan



HIV/AIDS dan Keluarga Berencana" berupa hibah sebesar DM. 20.000.000 (Dua puluh juta Deutsche Mark).

Saat ini, *draft* Persetujuan Keuangan RI-RFJ senilai DM 45 juta untuk proyek pengembangan pendidikan pelaut untuk tahun 2000 sedang dibahas antara kedua pihak dan diharapkan dapat ditandatangani dalam waktu dekat.

Pada masa krisis, RFJ turut berupaya membantu pemulihan ekonomi seperti bantuan teknis dalam upaya restrukturisasi sistem perbankan nasional, bantuan dalam penyusunan UU Persaingan Sehat, dan lain-lain.

f. Investasi

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RFJ telah menanda-tangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal (P4M) di Jakarta pada 8 November 1968. Persetujuan tersebut mulai berlaku pada 24 April 1971. Dalam perkembangannya, Pemerintah RFJ mengusulkan untuk melakukan peninjauan kembali atas Persetujuan tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama ini. Pihak Indonesia pada prinsipnya menyetujui usulan RFJ dimaksud. Pada tanggal 1-4 Februari 1999 dan 21-22 Agustus 2000 kedua pihak telah melakukan negosiasi guna membahas usulan perubahan P4M tersebut. Dari hasil perundingan terakhir, masih terdapat beberapa masalah *pending* seperti: *Most Favoured Nations Provisions*, dan *Settlement of Disputes*.

Investasi RFJ di Indonesia berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga 31 Juli 2000 mencapai US\$ 9,848 milyar (4,31% dari total PMA) yang mencakup 192 proyek. Investasi RFJ tersebut menduduki



mencakup 192 proyek. Investasi RFJ tersebut menduduki peringkat ke-10 dalam daftar negara penanam modal asing di Indonesia.

3.3. Kerjasama Teknik

Kunjungan Bilateral, Pameran dan Peran Swasta

1. Pada tanggal 27-29 Januari 1994 diadakan konferensi Duta-duta Besar RFJ untuk kawasan Asia Pasifik di Bonn yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan baru dari pemerintah RFJ di Asia Pasifik. Pemerintah RFJ melihat bagaimana pentingnya Wilayah Asia, mengingat pertumbuhan ekonominya yang pesat.
2. Pihak Jerman mengharapkan keterlibatan kalangan swasta Indonesia dalam pembangunan Jerman bagian timur, maupun dalam hal pembelian produk Jerman bagian timur, juga kemungkinan investasi oleh Indonesia di Jerman bagian timur khususnya dengan tujuan rehabilitasi produk-produk yang ada. Indonesia telah memanfaatkan peluang-peluang yang ditawarkan oleh pemerintah RFJ di dalam usaha pembangunan di Jerman bagian Timur antara lain :
 - Perusahaan Indonesia "Salim Group" telah menanamkan modalnya dibidang Kimia di Roulau.
 - Pemerintah Indonesia memesan 3 buah Kapal keruk dari perusahaan "Volkwerf" di Stralsund.
 - PT "Bahana Utama" telah memesan 2 Kapal peti kemas dari perusahaan kapal di Wismar.



3. Telah diadakan seminar pada tanggal 9 Februari 1994 di Bonn antara KBRI dengan negara bagian Mecklenburg Vorpommern mengenai promosi investasi dan kerjasama RI-Mecklenburg khususnya dibidang perkapalan.

Dalam seminar tersebut diuraikan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia khususnya investasi, perdagangan, serta kerjasama yang telah dilaksanakan dengan pihak Jerman. Juga dijelaskan mengenai kerjasama yang telah dilakukan antara PT. PAL dengan beberapa galangan kapal dinegara bagian tersebut.

Dari pihak Jerman juga mengemukakan mengenai potensi yang dapat dikembangkan dalam bidang perkapalan antara PT. PAL dengan negara bagian tersebut.

Pada tanggal 29-30 Maret 1994, 18 anggota asosiasi Leveransir keperluan kapal RFJerman berkunjung ke Indonesia dan akan menyelenggarakan simposium di Jakarta. Simposium akan dibuka oleh Dubes RFJerman di Jakarta, dan rombongan tersebut juga berkunjung ke PT. PAL di Surabaya.

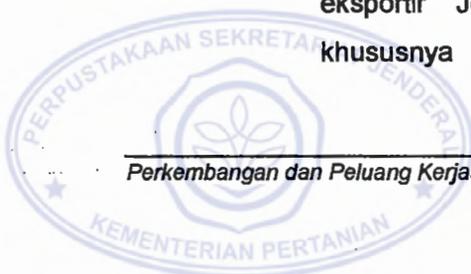
4. Pada tanggal 1-5 Oktober 1996 PT. PAL Indonesia untuk pertama kalinya ikut Pameran shpbuilding, Machinery + Marine Technolog '96 (SMM 96) di Hamburg.
5. Juga diadakan Seminar oleh kantor pengacara Paten Bardehle and Partner tanggal 3 Februari 1994 dengan pihak KBRI-BONN. Dalam kesempatan tersebut KBRI telah menjelaskan mengenai kemudahan-kemudahan yang diperoleh investor asing dengan kebijakan pemerintah dibidang regulasi seperti penyederhanaan



pihak KBRI-BONN. Dalam kesempatan tersebut KBRI telah menjelaskan mengenai kemudahan-kemudahan yang diperoleh investor asing dengan kebijakan pemerintah dibidang regulasi seperti penyederhanaan prosedur didalam cara-cara mendapatkan lisensi untuk penanaman modal. Juga dijelaskan mengenai hal-hal seperti :

- Pasar domestik maupun pasar regional (dalam kerangka AFTA) yang sangat besar dengan "buying power" yang relatif tinggi.
- Mengenai insentif, pengenaan pajak dan fasilitas bagi investor asing seperti: berbagai jenis pengecualian pajak bagi barang modal dan barang pembantu untuk investasi.
- Restitusi pajak dan jumlah minimum modal yang ditanamkan hanya US\$ 250 ribu serta ketentuan kepemilikan.
- Dengan adanya AFTA akan sangat menguntungkan bagi pengusaha RFJerman bilamana memiliki basis produksinya di Indonesia, karena pasaran produknya tidak terbatas hanya di Indonesia tetapi juga kawasan Asia Pasifik lainnya.

6. Pada tanggal 4 Oktober 1994 di Hamburg telah diresmikan kantor PT "Surveyor Indonesia (SI)" oleh Dubes RI - Bonn. Tujuan pembukaan Kantor SI terutama adalah untuk meningkatkan hubungan dagang RI dan RFJ sebagai fasilitator perdagangan guna meyakinkan eksportir Jerman bahwa aktifitasnya di Indonesia, khususnya dalam perdagangan dan investasi tidak



7. Pada tanggal 10-13 Mei 1994 pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Bali Exporters Club (BEC) yang bergerak dibidang kerajinan tangan kayu, ukiran perak, garment, footwear, interior design, keramik, souvenirs dan barang-barang perhiasan telah mengunjungi Hamburg.
8. Pada tanggal 8 Oktober 1994, 21 eksportir kopi Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) telah mengadakan promosi kopi ke Hamburg dan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha/importir-importir kopi RFJ sebagai usaha untuk meningkatkan ekspor kopi RI terutama melalui Hamburg sebagai pintu gerbang ke Eropa Barat dan Timur.
9. Pada tahun 1995, Indonesia berpartisipasi dalam 13 pameran dagang. Adapun ke 13 pameran dagang tersebut adalah :
 - a. Pameran International Mebel Messe, Koln.

Pameran dagang khusus untuk mebel yang terbesar di Eropa dan diselenggarakan setiap tahun di Koln. Pameran ini diselenggarakan pada tanggal 17-22 Januari 1995 dan ini merupakan pameran yang ke 30 kalinya yang diikuti oleh 1.453 perusahaan.

Tahun ini partisipasi Indonesia diwakili oleh 10 Perusahaan produsen mebel rotan dan mebel kayu termasuk satu diantaranya adalah perusahaan BUMN. Dua diantaranya berpartisipasi secara mandiri. Partisipasi Indonesia kali ini dikoordinir oleh BPEN. Dalam tahun 1992-1994 partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinir oleh ASMINDO (Assosiasi Permebelan Indonesia).



mandiri. Partisipasi Indonesia kali ini dikoordinir oleh BPEN. Dalam tahun 1992-1994 partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinir oleh ASMINDO (Assosiasi Permebelan Indonesia).

b. **Ambiente Fair-Internat, Frankfurter Messe**

Pameran dagang khusus untuk consumer goods dan diselenggarakan setiap tahun di Frankfurt. Tahun ini, pameran tersebut diselenggarakan dari tanggal 18-22 Februari 1995.

Partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinir oleh BPEN dan diwakili oleh 12 perusahaan yang menampilkan produk-produk wooden articles, ukiran-ukiran bali, mebel dan keranjang rotan, barang-barang dari gelas dan plastik, terracotta, stuffed toys dan gift articles.

c. **Hannover Messe**

Pameran tersebut diselenggarakan dari tanggal 3-8 April 1995 dan diikuti oleh 7.050 perusahaan dari 71 negara. Partisipasi Indonesia dalam pameran ini untuk ketiga kalinya sejak tahun 1993.

Khusus untuk penyelenggaraan pameran 1995, Indonesia mendapat kehormatan sebagai peserta "Partner Country" dan sekaligus menjadi puncak peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka di Eropa. Dalam pameran ini, Indonesia diwakili oleh 77 peserta dan dikoordinir oleh Komite Nasional Peringatan 50 Tahun Indonesia Merdeka di Eropa



tanggal 2 April 1995 bertempat di Kuppelsaal, Hannover.

Setelah acara pembukaan, Bapak Presiden RI dan Kanselir Jerman menyaksikan penandatanganan 10 MOU Kerjasama Industri di berbagai sektor antara lain 10 perusahaan terkemuka Indonesia dengan mitra dagangnya dari Jerman. Nilai total MOU tersebut mencapai Rp 3 trilyun dan 70% dari nilai tersebut merupakan investasi/modal Jerman yang masuk ke Indonesia.

d. Import Messe Berlin

Pameran tersebut diselenggarakan pada tanggal 26-29 April 1995 dan diikuti oleh 950 perusahaan, 860 diantaranya berasal dari luar negeri Jerman. Partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinasikan oleh BPEN dan diwakili oleh 5 perusahaan, 3 perusahaan pakaian jadi dan 2 perusahaan kerajinan kulit dan kayu.

e. CPD (Collection Premieres Dusseldorf)/Musim Gugur.

Diselenggarakan pada tanggal 6-9 Agustus 1995 dengan jumlah peserta sekitar 1.550 perusahaan, 79% dari padanya berasal dari 25 negara asing. Pengunjung berjumlah 45.000 orang, sekitar 27% berasal dari luar negeri.

Partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinasikan oleh BPEN dan diwakili oleh 6 perusahaan yang menampilkan ladies fashion, country fashion, accessories dan lain-lain.



negara asing. Pengunjung berjumlah 45.000 orang, sekitar 27% berasal dari luar negeri.

Partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinasikan oleh BPEN dan diwakili oleh 6 perusahaan yang menampilkan ladies fashion, country fashion, accessories dan lain-lain.

f. ISPO (International Trade Fair for Sports Equipment and Fashion) /Musim Gugur.

Dalam pameran yang diselenggarakan tanggal 22-25 Agustus 1995 ini ikut berpartisipasi 1.700 perusahaan olah raga dari 42 negara. Partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinasikan oleh BPEN dan diwakili oleh 8 perusahaan dengan menampilkan pakaian dan alat-alat perlengkapan olah raga.

g. GDS (International Shoe Fair) /Musim Gugur.

Pameran ini dilaksanakan 2 kali setiap tahun, yaitu pada musim semi dan musim gugur. Tahun ini pameran Musim semi diselenggarakan dari tanggal 17-20 Maret 1995 sedangkan pameran Musim gugur diselenggarakan dari tanggal 15-18 September 1995.

Indonesia di bawah koordinasi BPEN ikut berpartisipasi dalam pameran Musim gugur tahun ini. Partisipasi Indonesia diwakili oleh 7 perusahaan produsen sepatu dan menampilkan sepatu dan accessories sepatu.



Oktober 1995 dan diikuti oleh 5.500 perusahaan dari 95 negara.

Partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinasikan oleh BPEN dan diwakili oleh 8 perusahaan yang menampilkan produk-produk canteens, fast-food, foodstuff, beverages dan catering.

- i. SPOGA-GAFA (International Trade Fair For Sport Goods, Camping and Garden Equipment).

Partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinasikan oleh BPEN dan diwakili oleh 6 perusahaan yang menampilkan produk-produk antara lain sporting goods, piala, riding equipment dan water sport.

- j. IKK (International Trade Fair For Refrigerating and Air Conditioning)

Pameran dagang khusus untuk alat pendingin dan alat penyejuk yang dilaksanakan setiap tahun di Essen. Pameran dilaksanakan tanggal 19-21 Oktober 1995 dan diikuti oleh 450 perusahaan dari 20 negara. Partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinasikan oleh BPEN dan diwakili oleh 4 perusahaan yang menampilkan antara lain refrigerators, air conditioning, aerology equipment, tools dan lain-lain.

- k. PRODUCTRONICA (International Trade Fair For Electronics Production)



air conditioning, aerology equipment, tolls dan lain-lain.

k. **PRODUCTRONICA (International Trade Fair For Electronics Production)**

Pameran dagang khusus untuk produk electronic dan dilaksanakan setiap tahun di Munchen. Pameran diselenggarakan tanggal 7-10 Nopember 1995 dan diikuti oleh 1.650 perusahaan dari 30 negara.

Partisipasi Indonesia dalam pameran ini dikoordinasikan oleh BPEN dan diwakili oleh 5 perusahaan yang menampilkan electronic component, printed circuit boards production dan lain-lain.

l. **ITB (International Tourism Exchange) Berlin**

Pameran tersebut diselenggarakan tanggal 4-8 Maret 1995 dan diikuti oleh 4.500 perusahaan/biro turisme dari 165 negara. Partisipasi Indonesia dikoordinasikan dan diwakili oleh Ditjen Parpostel dan menampilkan produk turisme, travel services, hotels, carriers dan lain-lain.

m. **IHM (International Handwerokmesse) Munchen.**

Pameran diselenggarakan tanggal 11-19 Maret 1995 dan diikuti oleh 1.600 perusahaan dari 30 negara. Partisipasi Indonesia dalam pameran ini adalah untuk ke-7 kalinya dan diwakili oleh Perusahaan Bali Bazar dari Zell am Main. KBRI Bonn telah membantu perusahaan tersebut untuk



oleh Ir. Sendjaja MBA telah berkunjung ke Hannover dan Hamburg tanggal 23-26 April 1996.

Pada kesempatan tersebut para pengusaha Jawa Timur yang bergerak dibidang mesin-mesin industri, conveyor belt, elektrik telah mengadakan pertemuan secara langsung dengan para pengusaha Jerman yang ikut dalam pameran Hannover antara lain Siegling GMBH dan Meyer Glitza, Freese GMBH yang bergerak dibidang conveyor belt serta hellux leuchten GMBH yang berbisnis lampu jalan/taman dan pengusaha-pengusaha lainnya.

11. Seminar "Trade and Cooperation with Central Java" telah diadakan pada tanggal 22 Oktober 1996 di Kadinda (SIHK) Hagen Jerman atas prakarsa Deutsche Investitions-Und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Bunderverband des Deutschen Exportandels (BDEx), Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) dan Sudwestfalische Industrie-und Handels kammer zu Hagen (SIHK). Selain para penyelenggara hadir dalam acara tersebut Delegasi dari Jawa Tengah dan DIY, Wakil Kepala Perwakilan RI di Bonn, Bapak Indro Yudono, pengusaha Jerman dan beberapa pengusaha Indonesia yang berdomisili di Jerman. Tujuan utama seminar ini adalah memperkenalkan kepada pengusaha Jerman tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh Propinsi Jawa Tengah serta langsung menjaring pengusaha Jerman yang ingin melakukan hubungan bisnis dengan pengusaha Indonesia.
12. Pada tanggal 26 Oktober 1996 telah diadakan konferensi dalam bidang bisnis dan teknologi GIF (German Indonesia Forum) ke-2 di Jakarta dan telah mencapai beberapa



pengusaha Jerman yang ingin melakukan hubungan bisnis dengan pengusaha Indonesia.

12. Pada tanggal 26 Oktober 1996 telah diadakan konferensi dalam bidang bisnis dan teknologi GIF (German Indonesia Forum) ke-2 di Jakarta dan telah mencapai beberapa kesepakatan yang dirumuskan pada suatu MOU. Hasil konferensi diatas dilaporkan kepada Presiden Soeharto dan Kanselir Helmut Kohl yang mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.
13. Pada tanggal 6-10 April 1997 Eraska Group mengadakan kunjungan ke Hamburg dengan maksud untuk menjajagi kemungkinan untuk meningkatkan ekspor Indonesia dan mencari partner dalam bidang :
 - Proyek hotel di Surabaya dan Jakarta;
 - Pusat perbelanjaan di Jakarta;
 - Proyek rumah sakit di Jakarta;
 - Pabrik gula di Sulawesi Selatan;
 - Pabrik semen di Jawa;
 - Kerjasama perbankan;
 - Kerjasama perikanan.
14. Menteri Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Syarifudin Baharsyah dan rombongan telah berkunjung ke Bremen dan Hamburg pada tanggal 3-8 Juli 1997. Tujuan kunjungan tersebut antara lain untuk menyaksikan pelelangan tembakau di Bremen dan menyematkan bintang jasa "Nara Raya" yang dianugerahkan oleh Presiden Soeharto kepada Mr. Walter Koehne, Direktur Bremen Tabakboerse yang telah berjasa pada Indonesia dalam mempererat hubungan kedua negara dibidang tembakau sejak 38 tahun yang lalu.

16. KJRI Berlin berpartisipasi dalam seminar dan simposium mengenai potensi bisnis dan investasi Indonesia dan malam kebudayaan Indonesia pada tanggal 6-10 Oktober 1997
17. Forum Indonesia-Jerman mengadakan pertemuan kerjasama ekonomi dan teknologi Indonesia-Jerman di Berlin pada tanggal 30 Nopember - 4 Desember 1997, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie.
18. Pada tanggal 3 Desember 1997 telah diadakan "Face to Face Meeting" antara Deputy Bidang Promosi BKPM, Bapak Sugihono Kadarisman dengan pengusaha Jerman di Bonn, dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha Jerman secara langsung dapat berkomunikasi dengan pejabat teras BKPM.

Kesepakatan Baru Kerjasama Bilateral

Pada tanggal 4 - 5 Oktober 2000 di Bonn diadakan pembicaraan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman untuk membahas kerjasama pembangunan kedua negara. Kesepakatan dituangkan dalam "Summary Record of German - Indonesia 2000"

Dalam rangka kerjasama keuangan, dana tersedia sebesar DM 193,44 Juta berupa pinjaman lunak. Sedangkan dalam rangka kerjasama teknik, jumlah dana yang disepakati sebesar DM 30 Juta. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek kerjasama keuangan dan teknik yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Summary Record of Negotiations. Alokasi dana untuk proyek-proyek dalam rangka kerjasama keuangan akan



Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek kerjasama keuangan dan teknik yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Summary Record of Negotiations. Alokasi dana untuk proyek-proyek dalam rangka kerjasama keuangan akan dicampur dengan kredit ekspor (mixed credit) kecuali untuk proyek-proyek kesehatan dan air bersih.

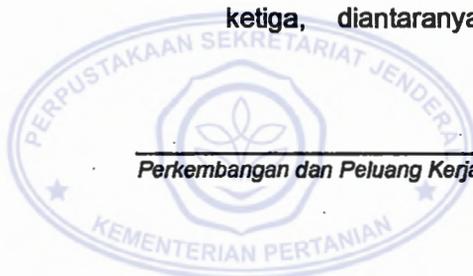
Pihak Jerman dan Indonesia pada kesempatan tersebut menyepakati bahwa pinjaman dan hibah Pemerintah Jerman dapat direalisasikan apabila :

- Pemerintah Jerman telah memberikan persetujuan atas dasar appraisal yang dilaksanakan oleh KFW, GTZ atau instansi pelaksana berwenang lainnya;
- Keseluruhan pembiayaan proyek telah tersedia;
- Kesepakatan internasional/antar pemerintah dalam bentuk loan agreement atau implementing agreement telah efektif berlaku.

Dalam pembicaraan bilateral tersebut kedua delegasi juga mempertimbangkan proyek-proyek dalam rangka kerjasama keuangan dan teknik di masa datang (future co-operation project). Disepakati pula bahwa usulan proyek kerjasama keuangan dan teknik tahun 2001 disampaikan kepada pemerintah Jerman sebelum akhir bulan Juni 2001.

Program Kerjasama Teknik Antar-Negara Berkembang (KTNB) Indonesia

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya pulih seperti sediakala. Hal ini berdampak pada anggaran KTNB Indonesia, sehingga beberapa program KTNB terkendala pelaksanaannya. Sementara itu pendanaan dari pihak ketiga, diantaranya negara-negara donor atau organisasi-



1) **Advisory Assistance in the Development of Smallholder's Oil Palm Plantation (ATA-146)**

Dalam dekade tahun 1970, Pemerintah Indonesia mulai merencanakan merehabilitasi perkebunan kelapa sawit yang dahulu dimiliki oleh Belanda yang berlokasi disisi barat Gunung Talamau, Sumatera Barat. Kondisi iklim dan tanah di wilayah ini sangat cocok untuk penanaman kelapa sawit.

Pada tahun 1981, PT. Perkebunan VI mulai membuka tanah yang ditujukan untuk penanaman kelapa sawit, membangun jalan-jalan dan mendirikan pabrik penggilingan minyak sawit. Seluas 6000 Ha tanaman kelapa sawit ditanam dimana 4800 Ha diperuntukan bagi 2400 kepala keluarga. Tahun 1985, dimulai panen dan pemrosesan minyak sawit.

Sejak itu pula 2400 kepala keluarga pemukim dan lebih dari 800 pegawai PT. Perkebunan VI menerima pendapatan dari proyek OPHIR. Peningkatan hasil proyek menghasilkan untuk pengembangan area disekitar dan sumber pencaharian bagi industri kecil untuk kebutuhan petani.

Tujuan

Ada dua tujuan pokok Proyek OPHIR, yaitu; rehabilitasi tanaman yang menguntungkan; mengadakan pelatihan guna melatih memberi dorongan bagi penduduk yang bermukim di area tersebut.

Pemerintah Jerman melalui KFW menyediakan pinjaman lunak bagi pembangunan di perkebunan kelapa sawit, antara lain untuk pembuatan jalan sepanjang 350 Km, 2400 rumah dan pabrik pemrosesan minyak sawit dengan kapasitas 40 ton tandan buah segar per jam. Tujuan utama dari bantuan teknik GTZ adalah



Pemerintah Jerman melalui KFW menyediakan pinjaman lunak bagi pembangunan di perkebunan kelapa sawit, antara lain untuk pembuatan jalan sepanjang 350 Km, 2400 rumah dan pabrik pemrosesan minyak sawit dengan kapasitas 40 ton tandan buah segar per jam. Tujuan utama dari bantuan teknik GTZ adalah

untuk membantu terbentuknya organisasi petani yang mantap guna mendukung petani dalam menangani tanamannya.

Pembinaan juga diberikan pada tingkat propinsi untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan melalui Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat I (PCC).

Pelaksanaan

- Peningkatan dan penyelesaian jalan di kawasan OPHIR Pasaman;
- Peningkatan kemampuan staf koperasi di bidang akunting dan manajemen;
- Penyesuaian organisasi koperasi dengan peraturan koperasi yang baru.

Sesuai rekomendasi Tim Evaluasi kepada BMZ, Jerman serta hasil rapat pembahasan draft agreement interdep tanggal 22 Juli 1993 di Kantor Pusat Departemen Pertanian, agar proyek dilanjutkan ke Phase V (jangka waktu 3 tahun), dimana pihak GTZ menyatakan telah menyanggupi untuk memberikan bantuan dana sebesar DM 1.750.000 selama phase tersebut. Dalam phase lanjutan ini kegiatan dititik beratkan pada faktor diseminasi atau perkiraan yang mencakup PIR-BUN lainnya di wilayah Sumatera Barat.



Arrangement Proyek ATA-146 kepada Kedutaan Besar Jerman yang telah ditandatangani atas nama Pemerintah Indonesia.

2) **Proyek Kalimantan Upland Farming Systems Development Project (ATA-437)**

Proyek KUF (Kalimantan Upland Farming Systems Development Project) merupakan proyek kerjasama teknis Pemerintah Indonesia dan Jerman berdasarkan usulan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan pada tahun 1988 (ATA-437). Republik Federal Jerman menugaskan GTZ (Deutsche Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit) untuk mendukung instansi yang bersangkutan dalam pengelolaan pembangunan pertanian lahan kering di propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Tujuan

Tujuan proyek adalah untuk meningkatkan produktivitas usahatani di wilayah Kalimantan Barat, Timur dan Selatan dengan memanfaatkan lahan kering secara optimal, melalui program usahatani terpadu (perkebunan, tanaman pangan dan peternakan).

Jangka waktu proyek adalah :

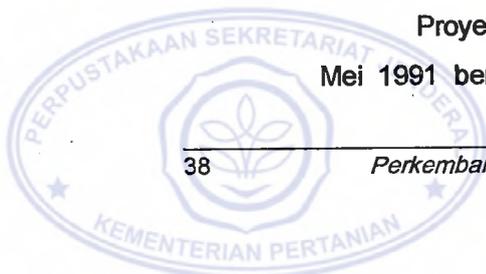
Phase I : 1 Mei 1992 - 30 April 1994

Phase II : 1 Mei 1994 - 30 April 1997

Phase III : 1 Mei 1997 - 30 April 2001

Pelaksanaan

Proyek KUF Phase Pertama yang dimulai pada tanggal 1 Mei 1991 berakhir pada tanggal 30 April 1994. Dalam kurun



Phase I : 1 Mei 1992 - 30 April 1994

Phase II : 1 Mei 1994 - 30 April 1997

Phase III : 1 Mei 1997 - 30 April 2001

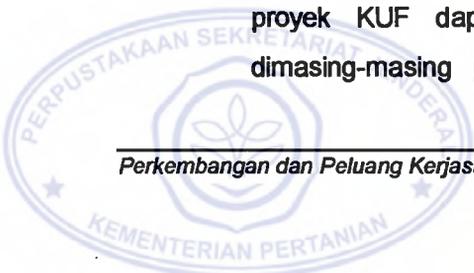
Pelaksanaan

Proyek KUF Phase Pertama yang dimulai pada tanggal 1 Mei 1991 berakhir pada tanggal 30 April 1994. Dalam kurun waktu dua setengah tahun untuk phase pertama, proyek telah mencapai beberapa hasil kerja yang baik. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi bersama Indonesia - Jerman melalui "Project Progress Review".

Pelaksanaan Proyek KUF tahap I sebagai tahap persiapan yang ditindaklanjuti pada tahap berikutnya. Dimana kegiatannya menitikberatkan pada pengembangan institusi dan sumberdaya manusia melalui pelatihan, sehingga fisik dilapangan belum tampak.

Phase selanjutnya (Tahap Kedua) pelaksanaan proyek KUF direncanakan mulai 1 Mei 1994 hingga 30 April 1997 selama 3 tahun. Kegiatan pada tahap kedua ditekankan pada implementasi fisik terpadu yang sudah ada pada program penanggulangan kemiskinan masing-masing sub-sektor, seperti usahatani terpadu di lahan marginal dan pengembangan sentra produksi buah-buahan di sub-sektor tanaman pangan.

Pendekatan KUF pada phase kedua tetap menekankan untuk memperkuat Sistem Pengelolaan Pengembangan Pertanian yang ada dan peranan dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Direkomendasikan pula agar pada phase kedua pendekatan proyek KUF dapat dikembangkan ke Kecamatan lainnya dimasing-masing propinsi oleh lembaga pemerintah dengan



Berdasarkan hasil pertemuan antara Departemen Pertanian dengan pihak GTZ Jerman pada tanggal 4 Maret 1994, secara informal telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk melanjutkan Phase II proyek selama 3 (tiga) tahun (1994-1997) dimana pihak Jerman telah menyanggupi untuk memberi dana sebesar DM 5.000.000.

Pembiayaan

Tahap I, proyek dilaksanakan selama 3 tahun (1991-1994) dengan biaya sebesar DM. 4.700.000 dalam bentuk grant, dengan pengalokasian dana sebagai berikut : DM 1.700.000 untuk biaya expert dari Jerman dan DM 3.000.000 untuk training, peralatan, konstruksi, lokal staf, biaya operasional, kontribusi, input untuk petani dan biaya konsultan Indonesia.

Tahap II, proyek dilaksanakan selama 3 tahun (1994-1997) dengan biaya sebesar DM 5.000.000.

Status Akhir Proyek

Perubahan atas Draft Exchange of Notes Phase II proyek yang merupakan hasil keputusan Rapat Interdep tanggal 29 Oktober 1994, telah disampaikan ke Sekretariat kabinet RI melalui surat Biro KLN tanggal 14 Oktober 1994 untuk diteruskan ke Pihak Pemerintah Jerman. Diinformasikan pula bahwa pada bulan November 1994 telah dilaksanakan pertemuan Tim Kecil untuk menyiapkan "Work Plan".

Sekretariat Kabinet RI pada bulan November 1994, telah mengirimkan perubahan-perubahan atas Draft Exchange of Notes kepada Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri telah pula menyampaikan perubahan-perubahan atas



bulan November 1994 telah dilaksanakan pertemuan Tim Kecil untuk menyiapkan "Work Plan".

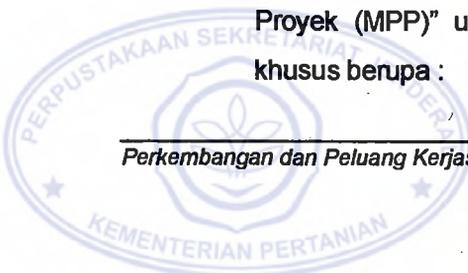
Sekretariat Kabinet RI pada bulan November 1994, telah mengirimkan perubahan-perubahan atas Draft Exchange of Notes kepada Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri telah pula menyampaikan perubahan-perubahan atas Draft Exchange of Notes tersebut kepada Kedutaan Besar Jerman di Jakarta.

Pada tanggal 23 Januari 1995, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri atas nama Pemerintah Indonesia telah menandatangani Exchange of Notes Phase II Proyek Kalimantan Upland Farming Systems Development untuk periode 1 Mei 1994 s/d 30 April 1997.

Sebagai tindak lanjut, telah diselenggarakan ZOPP-IV Project Planning Workshop yang terbagi dalam 2 (dua) bagian : (a) "Situation Analysis" (26 s/d 29 Oktober 1993) dan (b) "Plan of Operation" (2 s/d 4 November 1993). Workshop diikuti oleh peserta-peserta dari seluruh instansi terkait dan swasta. Dalam workshop telah berhasil dirumuskan kembali sasaran, tujuan, hasil-hasil serta kegiatan proyek.

Untuk Phase III yang dimulai tanggal 1 Mei 1997 s/d 30 April 2001 yang bisa dianggap sebagai fase akhir proyek lebih ditekankan pada aspek penyempurnaan beberapa hasil kerja proyek, serah terima dan proses diseminasi berbagai produk proyek yang telah dihasilkan.

Sebagai tindak lanjut telah dilaksanakan suatu Lokakarya Pra ZOPP V dari tanggal 8-10 Oktober 1996 di Banjarmasin, Balikpapan telah dibuat dan dirumuskan "Matriks Perencanaan Proyek (MPP)" untuk periode 1994-2001 atau dengan tujuan khusus berupa :



- Dirumuskannya rancangan (design) Proyek KUF tahap III (Mei 1997-April 2001), yang memperhatikan kesinambungan dari pendekatan, kegiatan dan dampak KUF setelah berakhirnya proyek.
- Meningkatkan komunikasi, saling pengertian dan kerjasama diantara pihak-pihak yang terkait dengan proyek KUF.

3) **Small Scale Agroindustry and agribusiness Development Project (ATA – 438)**

Proyek "Small-Scale Agroindustry and Agribusiness Development" dimulai pada Bulan November 1992 sebagai hasil kesepakatan pada pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Jerman pada tahun 1990. Sebagai instansi pelaksana ditunjuk Badan DIKLAT Pertanian, sedangkan pihak GTZ mewakili Kementrian Kerjasama Ekonomi Jerman.

Kegiatan

Kegiatan proyek ini direncanakan akan menitikberatkan pada usaha-usaha untuk memperbaiki teknologi pasca panen buah-buahan dan sayur-sayuran. Lokasi proyek ditetapkan di Sumatera Barat, Lampung dan Jawa Barat. Proyek akan berjalan untuk jangka waktu selama 9 tahun. Phase I proyek dirancang untuk jangka waktu 3 tahun, dimana pada waktu 12 bulan pertama digunakan untuk membuat perencanaan yang rinci.

Selama 3 (tiga) bulan (April s/d Juli 1993) telah dilaksanakan "Baseline Study on Potentials for Production and Processing of Fruit, Vegetables in West Java" dengan prioritas Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor dan Jakarta.

Pada tanggal 31 Oktober 1995, telah berakhirnya Proyek Small Scale Agroindustry and Agrobusiness-ATA-438



Selama 3 (tiga) bulan (April s/d Juli 1993) telah dilaksanakan "Baseline Study on Potentials for Production and Processing of Fruit, Vegetables in West Java" dengan prioritas Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor dan Jakarta.

Pada tanggal 31 Oktober 1995, telah berakhirnya Proyek Small Scale Agroindustry and Agrobusiness-ATA-438 (SSAADP) untuk Phase I. Pada tanggal 5 s/d 21 April 1995 telah dilaksanakan suatu evaluasi terhadap kegiatan proyek oleh team project Review Mission dari GTZ yang terdiri dari Mr. Helmut Wolf dan Mr. Bengt Bohnsteds. Dimana Phase I yang merupakan phase orientasi dilakukan sejak bulan Nopember 1992 s/d Oktober 1995.

Sesuai dengan kesepakatan yang dicapai mendapat perpanjangan proyek untuk Phase II selama 2 tahun mulai 1 Januari 1996 s/d 31 Oktober 1997. Proyek ini bertujuan untuk Mengembangkan Model Pengembangan Agroindustri dan Agrobusiness berskala kecil di 4 Kabupaten di Jawa Barat.

Sasaran

Sasaran proyek adalah meningkatkan nilai tambah yang diterima oleh petani kecil dan pengolah hasil pertanian kecil di wilayah pedesaan. "Target Group" dari proyek ini adalah petani kecil dan pengolah hasil pertanian kecil yang bergerak di bidang agroindustri di wilayah pedesaan terpilih.

Sebagai tindak lanjut proyek maka diadakan suatu workshop pada tanggal 21-22 Oktober 1997 dengan tujuan untuk membahas :

- a. Pencapaian sasaran, kendala dan tantangannya



menyebarluaskan ke daerah lain yang potensial. Hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan proyek adalah :

- a. Terbentuk, berfungsi dan dapat berkembangnya suatu model pengorganisasian kerjasama antara lembaga terkait untuk menunjang pengembangan agroindustri pedesaan skala kecil secara terpadu.
- b. Tersedianya program pelatihan dan penyuluhan yang terpadu, teruji dan disepakati untuk meningkatkan efisiensi dan produksi agroindustri skala kecil (buah dan sayuran) dan mendorong tumbuhnya agroindustri kecil baru pedesaan.
- c. Tersedianya model pembinaan dalam upaya meningkatkan kemampuan pelayanan dari lembaga terkait yang sesuai dengan kebutuhan dalam usaha mengembangkan agroindustri (buah dan sayuran) pedesaan skala kecil.
- d. Pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pada pertengahan Desember 1993, telah berhasil disusun "Project Planning Matrix" dan "Operational Plan" Phase I (November 1993 s/d Oktober 1995).

Biaya

Kontribusi Pemerintah Jerman pada Phase I sejumlah

DM

4,5 Juta yang terdiri dari :

- Penugasan 2 orang tenaga ahli asing untuk jangka panjang dan beberapa penasehat (adviser) jangka pendek;
- Penyediaan peralatan teknis untuk pilot/demostrasi;
- Pelaksanaan kegiatan training.



Biaya

Kontribusi Pemerintah Jerman pada Phase I sejumlah DM

4,5 Juta yang terdiri dari :

- Penugasan 2 orang tenaga ahli asing untuk jangka panjang dan beberapa penasehat (adviser) jangka pendek;
- Penyediaan peralatan teknis untuk pilot/demostrasi;
- Pelaksanaan kegiatan training.

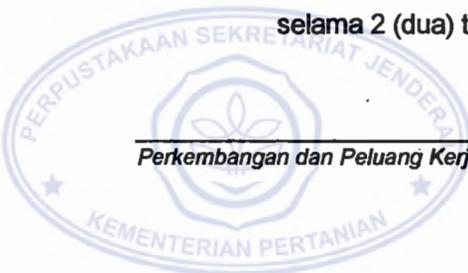
Tujuan proyek ini sejalan dengan tujuan dari Pemerintah Indonesia yang digambarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (PELITA) Kelima. Tujuan proyek ini juga sejalan dengan tujuan kebijaksanaan pengembangan dari Pemerintah Republik Jerman yang lebih menekankan pada pengembangan wilayah pedesaan.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, pengusaha berskala kecil, para penyuluh pedesaan dan organisasi swadaya akan diberi dukungan, yang mana merupakan komponen proyek ini.

Status Akhir Proyek

Pada tanggal 31 Oktober 1995, Proyek Small Scale Agroindustry and Agribusiness Development (ATA-438) telah berakhir, berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh Project Review Mission yang telah dilaksanakan pada tanggal 5-21 April 1995, mengusulkan agar proyek diperpanjang untuk Phase II.

Secara informal Pemerintah Jerman bersedia memberikan bantuan untuk kelanjutan Phase II Proyek Small Scale Agroindustry and Agribusiness Development (ATA-438) selama 2 (dua) tahun.



Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dibidang pembangunan dan pendidikan pertanian.

Selama di Indonesia Presiden RF Jerman mengunjungi beberapa obyek wisata antara lain :

- Mengunjungi kampus Diakoneia Modern di Pondok Gede, Jakarta
- Mengunjungi German Scholl dan German Centre di BSD, Jakarta
- Maninjau Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta
- Meninjau Candi Borobudur, Yogyakarta
- Meninjau Gereja Batak, Medan
- Meninjau Universitas Nommensen, Medan.

Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Indonesia ke Jerman pada tanggal 25 Pebruari – 1 Maret 2001 dengan agenda utama program kunjungan kerja adalah :

- (a). Perundingan dan pertukaran pikiran dengan pimpinan pemerintah Jerman untuk memanfaatkan dukungan pemerintah Jerman terhadap program-program disektor pertanian yaitu memperkuat SDM sektor pertanian dalam rangka desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah dan alih tehnologi.
 - Perundingan dan pertukar pikiran mendalam dengan Pejabat Kementerian Pertanian (BML), serta GTZ selaku instansi penyalur bantuan pemerintah.
- (b) Pertukarpikiran, diskusi dan perundingan dengan pimpinan dan Senior Staff Center for Tropical and Sub Tropical Agriculture and Forestry (CeTSAF) University di Göttingen mengenai :

- Bantuan CeTSAF untuk memperkuat program pendidikan SDM pertanian yang sangat dibutuhkan



- Perundingan dan pertukaran pikiran mendalam dengan Pejabat Kementerian Pertanian (BML), serta GTZ selaku instansi penyalur bantuan pemerintah.
- (b) Pertukarpikiran, diskusi dan perundingan dengan pimpinan dan Senior Staff Center for Tropical and Sub Tropical Agriculture and Forestry (CeTSAF) University di Gottingen mengenai :
- Bantuan CeTSAF untuk memperkuat program pendidikan SDM pertanian yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia baik untuk Lembaga Pendidikan Tinggi maupun Departemen Pertanian, seperti untuk PHD program, Master dan Non Degree Training dalam rangka mensukseskan program Desentralisasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - Tentang dukungan Universitas Gottingen khususnya CeTSAF dalam perencanaan dan pelaksanaan "Down Stream Program" sektor pertanian khususnya industri Bio Diesel berbasis CPO/kelapa sawit.
- (c) Pertukaran pikiran dan perundingan dengan Board of Managing Directors KFW, Bank Perkreditan Jerman yang menyediakan kredit dengan bunga ringan untuk proyek-proyek bantuan/kerjasama pembangunan pemerintah Jerman.

Hasil-hasil kunjungan :

- (1) Presiden Rau telah menyetujui dengan Institute Teknologi Pertanian Universitas Kassel untuk melaksanakan Seminar Internasional tentang Bio Diesel pada tanggal 27-28 September 2001 di Indonesia. Seminar bermaksud membahas program kerjasama



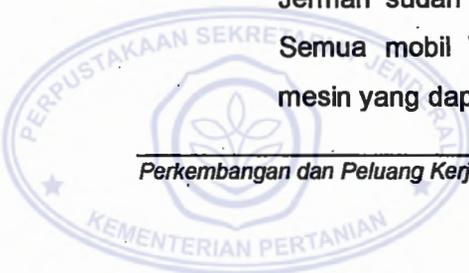
genetika (GMO) dan dampak desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Dalam issue tersebut Dr. Wille Secretary of State menyambut baik sikap Indonesia yang memperhatikan dampak lingkungan, dalam pembangunan sektor pertanian.

- (3) Mengenai program Bio Diesel, Federal Ministry of Agriculture (BML) menyambut baik gagasan ini karena sifatnya yang ramah lingkungan. BML mengharapkan agar areal penanaman kelapa sawit yang diperluas untuk sumber energi Bio Diesel tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sehubungan dengan aspek-aspek mono-culture. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa penanaman kelapa sawit dan upaya penghutanan kembali akan dilakukan pada areal-areal yang terbengkalai (deforestation areas) dan tidak ada perluasan penanaman kepada wilayah-wilayah hutan lindung dan hutan produksi yang ada sekarang ini. Areal penanaman kelapa sawit sebesar 3,5 juta Ha sekarang ini dinilai cukup untuk menunjang dimulainya proyek Bio Diesel.
- (4) Teknologi Bio Diesel sudah menjadi teknologi terapan terutama untuk industri mobil di Eropa, dimana negara eropa terutama Jerman tidak mungkin dapat memproduksi tambahan permintaan Bio Diesel dari Rapesheed (minyak sayur) karena keterbatasan lahan tanam. Kini telah dimulai usaha mengumpulkan minyak bekas penggorengan untuk diproses menjadi Bio Diesel. Perhitungan para ahli Jerman menunjukkan bahwa Bio Diesel baru mampu menggantikan 2 sampai 3 persen dari konsumsi yang diperlukan oleh industri mobil. Bio



- (4) Teknologi Bio Diesel sudah menjadi teknologi terapan terutama untuk industri mobil di Eropa, dimana negara Eropa terutama Jerman tidak mungkin dapat memproduksi tambahan permintaan Bio Diesel dari Rapsesheed (minyak sayur) karena keterbatasan lahan tanam. Kini telah dimulai usaha mengumpulkan minyak bekas penggorengan untuk diproses menjadi Bio Diesel. Perhitungan para ahli Jerman menunjukkan bahwa Bio Diesel baru mampu menggantikan 2 sampai 3 persen dari konsumsi yang diperlukan oleh industri mobil. Bio Diesel juga dapat digunakan untuk industri listrik dan penggerak mesin lainnya. Perlu dicatat bahwa Jerman akan menghapuskan penggunaan nuklir untuk listrik pada tahun 2003. Diperkirakan permintaan Bio Diesel dikemudian hari akan mencapai tingkat permintaan pada skala Global.
- (5) Salah satu pimpinan produsen Bio Diesel terbesar di Jerman : Olmuhle Leer Connemann Gmbh & Co di Leer. Produksi Bio Diesel di Leer termasuk yang terbesar di Jerman, dengan kapasitas 100,000 ton pertahun. Mr. Connemann adalah salah seorang dari sejumlah ahli yang menemukan Bio Diesel dan kemudian mendirikan pabrik Bio Diesel atas namanya Leer, Jerman.

Total permintaan Bio Diesel sampai tahun 2000 sebesar 700,000 ton dan ditaksir pada tahun 2001 akan menjadi sebesar 1,200,000 ton. Permintaan yang meningkat tajam ini akan semakin tajam lagi oleh karena industri mobil di Jerman sudah dimodifikasi mesin mobil kepada Bio Diesel. Semua mobil VW yang beredar di Jerman menggunakan mesin yang dapat menggunakan Bio Diesel. Sebagian industri



dalam jumlah significant hanya Indonesia dan Malaysia. Di kemudian hari persaingan dan kerjasama kearah ini harus dikembangkan dengan Malaysia.

Para pengusaha importir kelapa sawit, menyarankan agar Indonesia dapat menciptakan kehadiran yang lebih nyata di Eropa, karena selama ini impor kelapa sawit lebih banyak dilakukan melalui pihak ketiga atau keempat. Diusulkan agar dijajaki kemungkinan perdagangan langsung antara Pengusaha Indonesia dan Pengusaha di Eropa.

Salah satu pembeli terbesar kelapa sawit Indonesia menginformasikan bahwa mereka membeli melalui pedagang di Prancis dan Italy atau dari anak pesuhaannya di Indonesia dan Malaysia. Banyak hal menyangkut manajemen pemasaran yang harus diperbaiki agar perdagangan langsung dapat berjalan dengan baik, para pengusaha tersebut juga meminta pengamanan untuk pengiriman produksi disempurnakan terus agar tidak terjadi lagi kontaminasi terhadap CPO.

International Bio Diesel Workshop di Medan tanggal 2-4 Oktober 2001.

International Workshop Bio Diesel yang diadakan di medan pada 2-4 Oktober 2001 menghasilkan beberapa rumusan antara lain :

1. Perlunya penetapan kebijakan nasional yang terpadu di sektor pertanian dan kehutanan dalam hal pengembangan energi terbarukan yang mengarah pada :



International Bio Diesel Workshop di Medan tanggal 2-4 Oktober 2001.

International Workshop Bio Diesel yang diadakan di Medan pada 2-4 Oktober 2001 menghasilkan beberapa rumusan antara lain :

1. Perlunya penetapan kebijakan nasional yang terpadu di sektor pertanian dan kehutanan dalam hal pengembangan energi terbarukan yang mengarah pada :
 - a. Pengurangan ketergantungan pada energi fosil secara bertahap
 - b. Penggalan sumber energi terbarukan dari dalam negeri termasuk yang berbasis pertanian
 - c. Dukungan pemerintah dalam hal pengembangan energi terbarukan
 - d. Pemberian insentif/pembebasan pajak untuk bahan bakar terbarukan.
2. Perlunya penetapan strategi nasional dalam pengembangan energi terbarukan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang meliputi :
 - a. Identifikasi sumber-sumber energi terbarukan berbasis pertanian dan kehutanan (energi biomasa)
 - b. Riset dan pengembangan di bidang energi terbarukan
 - c. Pengembangan tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diolah menjadi bahan bakar cair (biodiesel)



3. perlunya penetapan program pengembangan energi terbarukan khususnya biodiesel untuk jangka pendek dan jangka panjang dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Mendorong investor dalam dan luar negeri untuk mendirikan industri biodiesel sawit di Indonesia
 - b. Mendorong industri automotive Indonesia untuk menyesuaikan produk-produk kendaraannya agar dapat menggunakan bahan bakar biodiesel
 - c. Mempromosikan penggunaan biodiesel untuk kendaraan bermotor kepada masyarakat luas
 - d. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan.

International Bio Diesel Workshop yang diadakan di Medan pada 2-4 Oktober 2001 atas prakarsa Departemen Pertanian bekerjasama dengan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dan Departemen Perindustrian telah menghasilkan outcome berupa penandatanganan dua "Memorandum of Understanding" sebagai langkah awal pengembangan biodiesel di Indonesia. Kedua MOU tersebut adalah :

1. MOU antara PT. London Sumatera sebagai pihak pertama dan PT Musim Mas sebagai pihak kedua dalam hal kerjasama investasi untuk pendirian industri biodiesel pertama di Indonesia.
2. MOU antara PT. London Sumatera sebagai pihak pertama dengan Shaz-Lan Development Sdn. Bhd dari Malaysia sebagai pihak kedua tentang studi kelayakan,



pengembangan biodiesel di Indonesia. Kedua MOU tersebut adalah :

- 1. MOU antara PT. London Sumatera sebagai pihak pertama dan PT Musim Mas sebagai pihak kedua dalam hal kerjasama investasi untuk pendirian industri biodiesel pertama di Indonesia.**
- 2. MOU antara PT. London Sumatera sebagai pihak pertama dengan Shaz-Lan Development Sdn. Bhd dari Malaysia sebagai pihak kedua tentang studi kelayakan, perancangan pabrik sampai dengan pendirian pabrik biodiesel dari minyak sawit yang pertama di Indonesia.**

Rencana pendirian pabrik biodiesel sawit tersebut diharapkan dapat terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.



IV. PELUANG KERJASAMA

Jerman sebagai salah satu negara anggota *Consultative Group on Indonesia* (CGI) telah memberikan dukungan yang cukup signifikan terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2000, Jerman telah tercatat sebagai negara penanam modal terbesar ke-10 di Indonesia dengan total nilai investasi mencapai US\$ 9.85 milyar. Khusus dalam pengembangan sektor pertanian, bantuan Pemerintah Jerman lebih difokuskan pada pengembangan perkebunan kelapa sawit, pengembangan sistem pertanian lahan kering, dan pengembangan sistem agribisnis dan agro-industri skala kecil dan menengah serta pengembangan teknologi bio-diesel.

Dalam bidang perdagangan, hubungan Pemerintah Indonesia dengan Belanda terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan total nilai perdagangan kedua negara yang semakin meningkat. Ekspor komoditas pertanian Indonesia ke negara Jerman selama ini mencakup kopi, teh, ikan olahan, minyak, lemak nabati, bahan margarine, tembakau, dan kakao.

4.1. Peluang Kerjasama Teknis Bidang Pertanian

Sebagai salah satu negara terkemuka di dunia, Jerman telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus dalam bidang pertanian, Jerman telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam hal manajemen, budidaya dan mekanisasi peralatan pertanian. Pemerintah Indonesia telah mengambil manfaat dari kemajuan negara tersebut melalui pengembangan kerjasama bilateral sektor pertanian. Selama ini Pemerintah Jerman telah memberikan bantuan untuk pengembangan sektor pertanian di

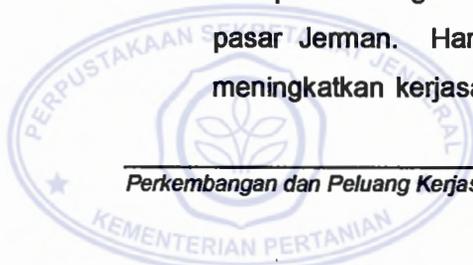


Indonesia dalam bentuk pemberian bantuan proyek yang ditujukan untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pembentukan organisasi petani yang tangguh peningkatan produktivitas usaha tani lahan kering di wilayah Kalimantan Barat, Timur dan Selatan melalui pengembangan sistem usaha tani terpadu dan pembangunan agroindustri pedesaan. Hubungan kerjasama tersebut perlu terus dibina dan ditingkatkan. Kesempatan untuk mempelajari aspek-aspek kemajuan teknologi pertanian yang dicapai oleh negara Jerman perlu terus diperluas baik melalui pengiriman tenaga Indonesia untuk belajar di Jerman maupun pengiriman tenaga ahli Jerman ke Indonesia untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.2. Peluang Kerjasama Perdagangan dan Investasi

Neraca perdagangan yang selalu minus bagi Indonesia dari tahun 1992-1998, diharapkan agar Pemerintah Republik Federal Jerman dapat membuka pasarnya lebih luas bagi Indonesia, khususnya bagi produk-produk Indonesia yang mempunyai nilai tambah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing negara dan melalui diversifikasi produk, diharapkan kedua negara dapat meningkatkan volume perdagangan.

Untuk dapat lebih memanfaatkan peluang tersebut, Pemerintah Indonesia harus berusaha mengatasi hambatan-hambatan perdagangan yang terjadi selama ini dengan negara Jerman. Hambatan pertama yang harus segera diatasi adalah rendahnya kualitas komoditas pertanian Indonesia sehingga tidak mampu bersaing dengan komoditas sejenis dari negara lain di pasar Jerman. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan kerjasama teknis bidang pertanian dengan Jerman



dengan demikian kualitas produk pertanian Indonesia akan mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Jerman. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus terus melakukan pendekatan dengan membangun kesepakatan-kesepakatan perdagangan dengan Pemerintah Jerman untuk mengatasi hambatan-hambatan tarif dan non-tarif serta kebijakan ekonomi lainnya.

Dalam membangun kerjasama bilateral, Indonesia diupayakan dapat memanfaatkan peluang kerjasama untuk menarik investasi bidang pertanian dari negara partner. Investasi asing di Indonesia dijamin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan investasi sektor pertanian diatur dengan Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000.

Investasi asing sektor pertanian dan industri makanan yang telah disetujui Pemerintah Indonesia secara umum mengalami peningkatan dan berfluktuasi dari tahun 1996 s/d 2000. Besarnya perkembangan investasi yang telah disetujui BKPM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM.

(US\$ Million)

Tahun	Sektor Pertanian				Industri Makanan
	Tanaman Pangan	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	
1996	52,2	86,0	1.168,1	79,8	691,4
1997	234,4	1,8	200,4	27,1	572,8
1998	224,4	15,4	725,4	33,0	342,0
1999	80,6	48,3	283,8	69,7	680,9
2000	311,3	18,4	59,1	49,5	701,0

Kerjasama bilateral bidang pertanian pada masa

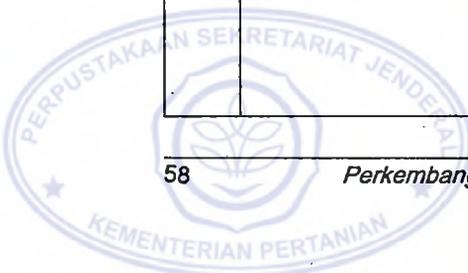


Kerjasama bilateral bidang pertanian pada masa mendatang diharapkan dapat memanfaatkan peluang investasi asing di Indonesia, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Adapun jenis komoditas, bidang investasi dan lokasi yang dapat dipromosikan secara bilateral dalam menarik investasi asing tersebut dapat dilihat pada Tabel Lampiran.



Tabel Lampiran 1. Keterangan Dasar

1.	Nama negara	:	Republik Federal Jerman
2.	Ibukota	:	Berlin (sejak 3 Oktober 1990)
3.	Bentuk negara	:	Federasi
4.	Kepala negara	:	Presiden Johannes Rau (SPD), terpilih tanggal 23 Mei 2000
5.	Kepala pemerintahan	:	Kanselir Gerhard Schroede (SPD), terpilih tanggal 27 Oktober 1998
6.	Letak	:	Jerman terletak di jantung Eropa
7.	Perbatasan	:	Berbatasan dengan: Denmark, Laut Utara dan Laut Baltik di Utara, Swiss dan Austria di Selatan, Belanda, Luxemburg, dan Perancis di Barat, Ceko, Slovakia dan Polandia di Timur
8.	Wilayah	:	Jerman memiliki wilayah seluas lebih kurang 357.041 km ² . Jerman bagian Barat seluas 248.708 km ² , dan Jerman bagian Timur seluas 108.333 km ² . Jarak dari Utara ke Selatan sepanjang 876 km dan dari Timur ke Barat sepanjang 640 km. Panjang perbatasan Jerman adalah 3.758 km
9.	Iklim	:	Memiliki empat musim. Temperatur rata-rata 9°C. Pada bulan terdingin (Januari) temperatur antara 1,5°C di daratan rendah dan -6°C di daerah pegunungan dan dimusim panas temperatur °C
10.	Penduduk	:	82.087.361 jiwa (Juli 1999). Terdiri dari 91,5% Jerman, 2,4% Turki, 0,7% Italia, 0,4% Yunani, 0,4% Polandia, 4,6% lain-lain. Bangsa Jerman merupakan suatu proses pembentukan dari berbagai suku bangsa yang mendiami dan pernah datang ke wilayah Jerman terutama Frank, Saxon, Rheinland, Swabian, dan Bavarian. Suku-suku bangsa ini telah lama kehilangan ciri-cirinya yang asli, tetapi tradisi dan dialek bahasanya masih hidup di wilayah aslinya. Saat sekarang, suku bangsa yang ada tidak lagi identik



10.	Penduduk	:	82.087.361 jiwa (Juli 1999). Terdiri dari 91,5% Jerman, 2,4% Turki, 0,7% Italia, 0,4% Yunani, 0,4% Polandia, 4,6% lain-lain. Bangsa Jerman merupakan suatu proses pembentukan dari berbagai suku bangsa yang mendiami dan pernah datang ke wilayah Jerman terutama Frank, Saxon, Rheinland, Swabian, dan Bavarian. Suku-suku bangsa ini telah lama kehilangan cirinya yang asli, tetapi tradisi dan dialek bahasanya masih hidup di wilayah aslinya. Saat sekarang, suku bangsa yang ada tidak lagi identik dengan negara bagian baru dibentuk setelah Perang Dunia II
11.	Hari Nasional	:	3 Oktober (Hari penyatuan Jerman)
12.	Agama	:	Jerman bagian Barat: 65.600.000 (42,9% Katholik Roma, 40,7% Protestan, 6,4% Yahudi, 2,8% lain-lain). Jerman bagian Timur: 15.600.000 (mayoritas beragama Protestan)
13.	Bahasa	:	Bahasa Jerman yang berakar dari bahasa Indo Jerman sebagaimana bahasa Denmark, Swedia, Belanda, bahasa Inggris
14.	Ekonomi		
	Sumberdaya alam	:	Besi baja dan batubara
	Mata uang	:	DM (Deutsche Mark)
			US\$ 1 = DM 2,1681
	GNP perkapita	:	DM 34.700 (US\$ 19.715) tahun 1998
	GDP perkapita	:	US\$ 22.100 (1998)
	Laju inflasi	:	0,6% (1999)



Tabel Lampiran 2. Ssusunan Kabinet Republik Federal Jerman (1998-2002)

1.	Kanselir	: Gerhard Schroder (SPD)
2.	Menteri Luar Negeri dan Wakil Kanselir	: Joschka Fischer (Die Grune)
3.	Menteri Dalam Negeri	: Otto Schily (SPD)
4.	Menteri Kehakiman	: Ny. Prof.Dr. Herta Daubler Gmelin (SPD)
5.	Menteri Keuangan	: Hans Eichel (SPD)
6.	Menteri Perekonomian	: Werner Muller (non partai)
7.	Menteri Perlindungan Konsumen, bahan Makanan dan Pertanian	: Renate Kunast (Grune/11-01/2001)
8.	Menteri Sosial dan Tenaga Kerja	: Walter Riester (SPD)
9.	Menteri Pertahanan	: Rudolf Scharping (SPD)
10.	Menteri Urusan keluarga, Senior, Wanita dan Pemuda	: Ny. Dr. Christine Bergmann (SPD)
11.	Menteri Kesehatan	: Ny. Ulla Schmidt (SPD/09-01/2001)
12.	Menteri Perhubungan, Pembangunan, dan Perumahan	: Kurt Bodewig (SPD/Nopember 200)
13.	Menteri Lingkungan Hidup, Perlindungan Alam dan Pengamanan Reaktor	: Jurgen Trittin (Die Grune)
14.	Menteri Pendidikan dan Riset	: Ny. Edelgard Bulmahn (SPD)
15.	Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan	: Ny. Heidemarie Wieszoreck Zeul (SPD)
16.	Menteri Negara/Sekretariat Kabinet	: Dr. Frank – Walther Steinmeier (SPD/1999)
17.	Menteri negara	: Hans Martin Bury
18.	Menteri Negara Pembangunan Negara Bagian Baru	: Rolf Schwanitz (SPD)
19.	Menteri Negara Kebudayaan	: Julian Nida-Rumelin (SPD/11-01-2001)

Tabel Lampiran 3. Peluang Investasi Sektor Pertanian di Indonesia

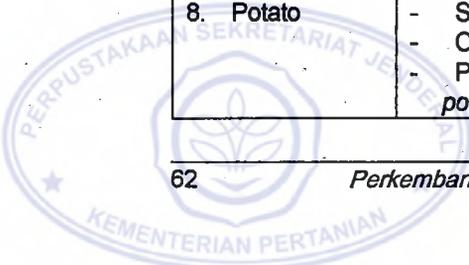


Tabel Lampiran 3. Peluang Investasi Sektor Pertanian di Indonesia

Commodities	Fields of investment	Provinces
Food Crop		
1. Paddy/rice	<ul style="list-style-type: none"> - Production input - Seeding - Agric. Machinery service - Marketing - Rice Milling Unit - Processing (rice powder) 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, South Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara Barat.
2. Cassava	<ul style="list-style-type: none"> - Marketing - Processing (tapiokca, <i>pellet glucosa</i>, starch, sorbitol, spiritus, dextrin) 	Lampung, North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, East Nusa Tenggara
3. Corn	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (maize, cooking oil, maizena, ethanol, maize powder, feed, <i>organic acid</i>) 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, East Nusa Tenggara, North Sulawesi
4. Soybean	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (tempe, sauce, ketchup, powder, feed, cooking oil, nata de soy) 	West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, south Sulawesi, Lampung, West Nusa Tenggara
5. Groundnut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, West Nusa Tenggara, South Kalimantan, South Sulawesi
6. Mungbean	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, South Sulawesi
7. Sweet potato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, East Nusa Tenggara,

	Jaya
--	------

Commodities	Fields of Investment	Provinces
Horticulture		
1. Manggo	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned juice, dried fruit, jam, jelly, pickle</i>) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Bali, NTB, NTT, South Sumatera, North Sumatera, Lampung, Yogyakarta
2. Durian	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, South Sumatera, Lampung, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan
3. Rambutan (hairy fruit)	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Lampung, Yogyakarta, Bali, South Kalimantan, Central Sulawesi
4. Mangosteen	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Java, Bali, South Sulawesi, West Sumatera, Riau, Central Java, East Java
5. Salacca (snake fruit)	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing 	Central Java, Yogyakarta, East Java, North Sumatera, North Sulawesi, South Sulawesi, Bali, NTB, West Java, Irian Jaya
6. Orange	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, West Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan
7. Banana	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>Powder, chips, puree, jam, wine, syrup, nector, juice, jelly</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, NTB, NTT, Bali, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-East Sulawesi, West Kalimantan
8. Potato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>chips, powder</i>) 	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, South



8. Potato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>chips, powder</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi
9. Cabbage	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Marketing - Processing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, Jambi, South Sumatera, Lampung, Bali, South Sulawesi, North Sulawesi
10. Chilli	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>sauce, paste, powder, chilli oil, dried chilli</i>), 	North Sumatera, Riau, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta, South Sulawesi, North Sulawesi, NTB, Bali
11. Shallot	<ul style="list-style-type: none"> - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, NTB, West Sumatera, Lampung
12. Carrot	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
13. Tomato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
14. Orchid and other ornamental plant	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>oriental plant : parfume</i>) - Marketing 	North Sumatera, Bengkulu, Jambi, West Java, West Kalimantan, East Kalimantan, Irian Jaya, Riau, North Sulawesi, Bali, Yogyakarta, Jakarta
15. Medicine plant	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>traditional medicine/jamu</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, West Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, South Sulawesi



	<ul style="list-style-type: none"> - beef, sausage, leather (industry) - Marketing 	
- Dairy cow	<ul style="list-style-type: none"> - Breeding - Fattening - Processing (milk, milk sweet, cheese, yoghurt) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, Lampung
- Poultry	<ul style="list-style-type: none"> - Breeding - Cultivation - Processing (comed, sausage) - Marketing 	Java, Lampung, South Sulawesi, East Kalimantan
- Goat	<ul style="list-style-type: none"> - Breeding - Fattening - Processing (milk, leather, sausage) - Marketing 	Sumatera, Java, West Kalimantan
- Pig	<ul style="list-style-type: none"> - Breeding - Fattening - Processing (sausage) - Marketing 	West Kalimantan, Riau, Islands, North Sumatera, Irian Jaya

Commodities	Fields of investment	Provinces
Estate		
- Rubber	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (latex, dried rubber, crumb rubber, slab) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, South Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi
- Palm oil	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (CPO, palm kernel, sludge) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya

- Coffe	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (powder, coffee green, instan coffe) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, South Kalimantan,
---------	--	--



- Coffe	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (powder, <i>cofee green</i>, instan coffe) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
- Cacao	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>cocoa</i>, powder, <i>cocoa cake</i>, fat, <i>shall</i>, <i>plp</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Lampung, Bali, NTT, Bengkulu, West Java, Central Java, Yogyakarta, West Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
- Cashew nut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (fried <i>cashew nut</i>, <i>shell liquid</i>, sweet) - Marketing 	Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
- Coconut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (cooking oil, coconut coal/arang, handy craft) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
- Pepper	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (medicines, pepper powder, seasoning) - Marketing 	South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Kalimantan, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, South Sulawesi, South-east Sulawesi



BAGIAN PROYEK PENINGKATAN KERJASAMA LUAR NEGERI
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2001

